

**SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL
DAERAH AMBON**

69
M

kaan
Pariwisata

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL DAERAH AMBON

Penulis :

Sumarsono : Ketua
Ernayanti : Anggota
Lindyastuti S. : Anggota

Penyempurna :
Zulyani Hidayah



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BAGIAN PROYEK PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBUDAYAAN NUSANTARA
1993

KATA PENGANTAR

Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah melakukan penelitian dan mengkaji tentang Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Ambon, isinya tentang pola-pola pemerintahan dan kepemimpinan masyarakat Ambon serta nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sistem pemerintahan tradisional Ambon.

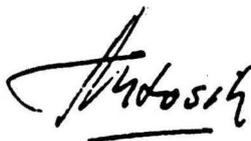
Nilai-nilai yang terkandung di dalam naskah ini adalah nilai perlindungan, nilai demokrasi dan nilai pengawasan yang dapat menunjang pembangunan, baik fisik maupun spirituil.

Kami menyadari bahwa buku ini masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, semua saran untuk perbaikan yang disampaikan akan kami terima dengan senang hati.

Harapan kami, semoga buku ini dapat merupakan sumbangan yang berarti dan bermanfaat serta dapat menambah wawasan budaya bagi para pembaca.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peneliti dan semua pihak atas jerih payah mereka yang telah membantu terwujudnya buku ini.

Jakarta, Juli 1993
Pemimpin Bagian Proyek Penelitian
Dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Mintosih', with a horizontal line underneath the name.

Sri Mintosih
NIP. 130 358 048

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Usaha untuk mengetahui dan memahami kebudayaan daerah lain selain kebudayaan daerahnya sendiri baik lewat karya-karya sastra tradisional maupun dalam wujud kebudayaan yang lain merupakan sikap terpuji dalam rangka perwujudan integrasi nasional. Keterbukaan sedemikian itu akan membantu anggota masyarakat untuk memperluas cakrawala pandangnya.

Untuk membantu mempermudah pembinaan saling pengertian dan memperluas cakrawala budaya dalam masyarakat majemuk itulah pemerintah telah melaksanakan berbagai program, baik dengan menerbitkan buku-buku yang bersumber dari naskah-naskah nusantara, maupun dengan usaha-usaha lain yang bersifat memperkenalkan kebudayaan daerah pada umumnya. Salah satu usaha itu adalah Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara. Mengingat arti pentingnya usaha tersebut, saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku yang berjudul .”**Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Ambon**”.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini. Maka penggalan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam naskah tradisional maupun dalam wujud kebudayaan yang lain yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia dapat ditingkatkan

sehingga tujuan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang sedang kita laksanakan dapat segera tercapai.

Namun demikian perlu disadari bahwa buku-buku hasil penerbitan Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara ini baru merupakan langkah awal. Kiranya kelemahan dan kekurangannya yang masih terdapat dalam penerbitan ini dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati
NIP. 130 202 902

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN ..	v
DAFTAR ISI	vii
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Ambon Sebagai Daerah Kajian	6
Bab III. Deskripsi Sistem Pemerintahan Tradisional ...	34
Bab IV. Nilai-Nilai Budaya Dalam Sistem Pemerintahan Tradisional Masyarakat Ambon	58
Bab V. Kesimpulan	69
DAFTAR KEPUSTAKAAN	71

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah mampu untuk hidup seorang diri. Di mana atau dalam keadaan apapun manusia cenderung hidup berkelompok. Pengelompokan sosial itu antara lain dilandasi oleh adanya persamaan kepentingan antara sesama anggota kelompoknya. Untuk mewujudkan kepentingan bersama itu manusia mengorganisir dirinya ke dalam dengan menciptakan perangkat pengaturan dan pengendalian sosial yang sesuai dengan lingkungan di mana mereka hidup dan bergaul secara bersama. Dengan kata lain diartikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang coraknya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan latar belakang sejarah suku bangsa yang bersangkutan. Dalam mengatur masalah tanah misalnya suku bangsa dengan latar belakang budaya ladang berpindah di Sumatera akan berbeda dengan suku bangsa Jawa yang sudah sejak lama mengenal sistem pertanian secara menetap. Dalam perjalanan sejarahnya juga, suku bangsa di Indonesia mempunyai penga-

laman-pengalamannya sendiri. Pengaruh kebudayaan asing sebagai akibat terselenggaranya hubungan perdagangan, peperangan dan penjajahan ikut mewarnai corak kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia termasuk di dalamnya sistem pemerintahan.

Berbagai bentuk pemerintahan tradisional yang pernah tumbuh dan berkembang di kalangan suku bangsa di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. Bentuk pemerintahan "desa" di kalangan masyarakat Jawa telah dikenal sejak lama. Sesuai dengan hajat kehidupan masyarakatnya yang umumnya diperoleh melalui pertanian padi sawah, maka salah satu perabot desanya adalah mantri "ulu-ulu". Kehidupan spiritual ditangani oleh "modin". Pada masyarakat Bali dikenal sistem pemerintahan "banjar". Selain mengurus masalah pemerintahan yang lain, masalah upacara keagamaan merupakan masalah yang khusus bagi tugas kepercayaannya. Selanjutnya pada masyarakat Aceh dikenal bentuk pemerintahan "gampong" dan "mukim". Sistem pemerintahan ini sangat dipengaruhi oleh tata kehidupan menurut ajaran agama Islam. Di suku bangsa Minangkabau dikenal pemerintahan "nagari". Di Sumatera Selatan dikenal adanya pemerintahan "dusun" dan "marga". Di Maluku dikenal dengan "Dusun Dati".

Sebagai konsekuensi logis dari Indonesia Merdeka maka beraneka corak kebudayaan suku bangsa tersebut, termasuk sistem pemerintahannya di persatukan di bawah sistem pemerintahan nasional, yaitu sistem pemerintahan yang dapat menampung kepentingan semua warga negara.

Berdasarkan pengamatan di lapangan diperoleh suatu kenyataan bahwa sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan bermasyarakat secara nasional itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik, khususnya di daerah tertentu. Hal ini antara lain disebabkan tidak sesuainya perangkat pengaturan dan pengendalian sosial dalam sistem pemerintahan itu dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Dalam beberapa aspek kehidupan sistem pemerintahan secara tradisional masih sangat dirasakan dominasinya. Benturan-bentur-

an di tingkat pemimpin maupun masyarakat dalam kondisi dualisme terkadang muncul. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang sedang membangun seperti sekarang ini suasana seperti itu jelas kurang menguntungkan. Sementara itu untuk memenuhi kepentingan-kepentingan warga masyarakat sistem pemerintahan harus dapat menjangkau dan diterima oleh seluruh lapisan warga masyarakat yang diperintahnya. Dalam kaitan ini aturan-aturan yang terdapat dalam sistem pemerintahan tradisional mempunyai andil yang besar dalam penyusunan aturan-aturan yang berskala nasional.

B. POKOK MASALAH

Sesuai dengan latar belakang tersebut di atas dalam kesempatan ini akan dikaji sistem pemerintahan tradisional pada masyarakat Ambon. Masyarakat Ambon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang sarat dengan proses akulturasi sejalan dengan masuknya kebudayaan-kebudayaan asing melalui jalur perdagangan rempah-rempah dan penguasaan wilayah. Unsur-unsur kebudayaan asing tersebut sebagian merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga usaha untuk menemukannya bukanlah pekerjaan mudah. Namun dalam sistem pemerintahan tradisionalnya masih terkandung nilai-nilai budaya asli sebagai cermin kehidupan sosial masa lampau dan yang sebagian masih menjadi pedoman dalam tindakan-tindakan sosial masyarakat Ambon. Sehubungan dengan itu kegiatan ini akan mencoba mendeskripsikan sistem pemerintah tradisional yang ada dan sekaligus mencoba mengungkap nilai-nilai budaya yang mendasari sistem pemerintahan tradisional tersebut.

C. TUJUAN

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas pengkajian tentang sistem pemerintahan tradisional Ambon bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pemerintahan tradisional Ambon, yaitu sistem pemerintahan yang tumbuh dan berkembang di daerah

ini sesuai dengan kebudayaan dan latar belakang sejarah daerah tersebut, serta berusaha menemukenali nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sistem pemerintahan tersebut. Sebagai khasanah budaya bangsa, kajian tentang sistem pemerintahan tradisional ini merupakan suatu usaha pendokumentasian nilai-nilai budaya bangsa.

D. METODOLOGI

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan sepenuhnya melalui studi kepustakaan. Penganalisaan sebagai suatu cara utama dalam kajian ini tidak dinilai dengan membangun suatu hipotesa. Tujuan utama pengkajian ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai sistem pemerintahan tradisional pada masyarakat Ambon, untuk selanjutnya berusaha menemukenali nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Penganalisaan dimulai setelah deskripsi sistem pemerintahan terbangun. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah dengan melihat struktur pemerintahan dan mekanisme pelaksanaannya.

E. GARIS BESAR ISI LAPORAN

Laporan tentang kajian sistem pemerintahan tradisional pada masyarakat Ambon ini berisikan 5 buah bab, yaitu pendahuluan, Ambon sebagai daerah kajian, deskripsi sistem pemerintahan tradisional Ambon, nilai-nilai budaya dalam sistem pemerintahan tradisional masyarakat Ambon, dan ringkasan.

- Bab I. "Pendahuluan". Berisikan uraian tentang latar belakang permasalahan pokok masalah, tujuan pengkajian, metodologi yang digunakan dalam kajian, dan garis-garis besar isi laporan.
- Bab II. "Ambon Sebagai Daerah Kajian". Berisikan uraian tentang lokasi dan lingkungan alam Ambon, kepadudukan, latar belakang sejarah, dan keadaan sosial ekonomi, dan budaya masyarakat Ambon.

- Bab III. "Deskripsi Sistem Pemerintahan Tradisional Ambon". berisikan uraian tentang pola-pola pemerintahan dan kepemimpinan masyarakat Ambon. Pemerintah dan kepemimpinan merupakan satu hal yang sangat erat kaitannya.
- Bab IV. "Nilai-Nilai Budaya Dalam Sistem Pemerintahan Tradisional Masyarakat Ambon". Berisikan uraian tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sistem pemerintahan tradisional Ambon. .
- Bab V. "Ringkasan". Berisikan intisari dari bab-bab yang ada.

BAB II

AMBON SEBAGAI DAERAH KAJIAN

A. LOKASI DAN LINGKUNGAN ALAM

Nama Ambon sebagai suatu wilayah dapat berarti sebuah kota, sekaligus sebuah pulau. Sebagai sebuah kota, Ambon berstatus kotamadya dan merupakan ibu kota Propinsi Maluku. Propinsi Maluku terdiri atas 4 daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kotamadya Ambon. Kotamadya Ambon terletak di Pulau Ambon, yaitu sebuah pulau kecil di bawah Pulau Seram. Secara administratif Kotamadya Ambon terdiri atas 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Nasanine, Kecamatan Sirimau, dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Sedangkan Pulau Ambon sendiri terbagi atas 5 kecamatan termasuk 3 kecamatan yang terdapat di Kotamadya Ambon. Dua kecamatan di luar Kotamadya Ambon adalah Kecamatan Leihitu dan Salahitu. Luas Pulau Ambon hanya sebesar 761 km², sedikit lebih besar dari Kota Jakarta (600 km²).

Secara astronomi Pulau Ambon terletak di antara 3^o29' LS – 3^o48' LS dan 127^o55' BT – 128^o21' BT. Karena letak astronominya Ambon termasuk ke dalam daerah tropis temperatur rata-rata di daerah ini adalah 26,6^o C. Sedangkan tem-

peratur maksimum $31,1^{\circ}\text{C}$ dan temperatur minimum $23,3^{\circ}\text{C}$. Berbeda dengan daerah Indonesia pada umumnya terutama Indonesia bagian barat, yang umumnya musim hujan jatuh pada musim angin barat, yaitu antara bulan Oktober – April. Hujan di daerah ini jatuh pada musim angin timur, yaitu antara bulan April – September, dengan musim hujan terjadi pada bulan Juni – Juli. Letak geografi Pulau Ambon yang langsung berhadapan dengan laut Banda, yaitu laut luas dan dalam setelah daratan Australia sebagai faktor yang mempengaruhi pola angin di Indonesia merupakan penyebab pola angin di daerah ini. Angin timur yang berhembus dari Australia ke Asia karena tingginya tekanan udara di Australia dan rendahnya udara di Asia seolah langsung mempengaruhi Pulau Ambon.

Secara geologis Pulau Ambon terletak di ujung utara dari busur Banda yang bersifat vulkanis. Namun demikian di Pulau Ambon tidak lagi terdapat gunung yang cukup tinggi. Di bagian tengah pulau ini terdapat daerah perbukitan. Masyarakat menyebutnya dengan daerah gunung-gunung. Di daerah pegunungan inilah tersebar perkebunan cengkeh milik rakyat yang telah terkenal sejak zaman dahulu. Peranan cengkeh yang merupakan tanaman komoditi dagang utama di pulau ini dimulai sejak masuknya penjajah Belanda pada abad XVII. Pada masa itu Maluku termasuk Pulau Ambon menjadi daerah penghasil cengkeh yang sangat terkenal di Eropa.

Sebagai administrasi pusat pemerintahan Propinsi Maluku, Kota Ambon memiliki berbagai sarana bagi pelayanan masyarakat. Kegiatan perekonomian masyarakat Maluku Tengah terutama yang terjadi di sekitar Ambon seperti Kei, dan Kepulauan Banda terdapat di Ambon. Sarana transportasi untuk menghubungkan pulau-pulau di dalam wilayah Propinsi Maluku yang terkenal dengan sebutan seribu pulau ini adalah kapal laut dan kapal terbang perintis. Kapal-kapal feri, yaitu kapal penyeberangan antar pulau kini telah melayar hampir semua trayek Ambon dengan pulau-pulau di sekitarnya, kehadirannya seolah telah membuka isolasi pulau-pulau di sekitar Ambon.

B. KEPENDUDUKAN

Seperti telah disebutkan di atas bahwa masyarakat yang menjadi obyek kajian dalam sistem pemerintahan tradisional ini adalah segenap penduduk Ambon yang tinggal di Pulau Ambon, dan yang secara administratif terbagi ke dalam 5 buah kecamatan, yaitu Kecamatan Leihitu, Kecamatan Salahitu, Kecamatan Baguala, Kecamatan Sirimau, dan Kecamatan Nusanine. Berdasarkan survei tahun 1990 penduduk Ambon berjumlah 390.620 jiwa. Dilihat dari kepadatan penduduknya Kecamatan Sirimau merupakan yang tertinggi, yaitu 902 jiwa/km². Setelah itu disusul oleh Kecamatan Baguala atau Teluk Ambon dengan 335 jiwa/km². Adapun kecamatan yang terendah kepadatan penduduknya adalah Nusanine, yaitu 94 jiwa/km². Seperti rata-rata pertambahan penduduk Indonesia secara keseluruhan, pertambahan penduduk di Ambon juga berkisar sekitar 2,5%.

Dilihat dari suku bangsa yang tinggal di Ambon pada saat ini telah banyak suku pendatang, terutama di kecamatan-kecamatan Nusanine, Sirimau, dan Baguala yang merupakan kecamatan-kecamatan yang termasuk ke dalam Kotamadya Ambon. Selain suku bangsa Ambon yang merupakan penduduk asli di Pulau Ambon, suku-suku bangsa yang tinggal di daerah ini antara lain adalah Orang Seram, Orang Lease, dan Orang Kei. Ketiga suku bangsa tersebut daerah aslinya adalah pulau-pulau di sekitar Pulau Ambon. Di samping itu di daerah ini juga tinggal Orang Buton dari Sulawesi Tenggara, Orang Bugis dan Orang Toraja dari Sulawesi Selatan serta Orang Jawa dan lain-lain. Penduduk non pribumi yang banyak tinggal di Ambon adalah Orang Tionghoa.

Mata pencaharian penduduk asli di Ambon umumnya adalah nelayan, bertani, dan berdagang. Tetapi pada saat ini sejalan dengan kemajuan daerah ini semakin beragam jenis mata pencaharian mereka. Pekerjaan sebagai pegawai negeri dan penjual jasa dilakukan oleh mereka yang tinggal di pusat-pusat kota. Penduduk pendatang seperti Orang Buton dan Orang Bugis banyak bermatapencaharian sebagai petani. Orang

Tionghoa yang umumnya tinggal di Kotamadya Ambon sebagian besar mereka berdagang. Orang Jawa yang tinggal di daerah ini pada umumnya bekerja sebagai pegawai negeri atau ABRI. Banyak di antara mereka yang karena tinggalnya di tempatkan di Ambon.

Perkembangan ekonomi penduduk di Ambon memberi peluang bagi penduduknya untuk bekerja rangkap. Kelancaran transportasi baik di darat yaitu transportasi yang menghubungkan antar kecamatan maupun transportasi laut yang menghubungkan Pulau Ambon dengan pulau-pulau lain di sekitarnya seperti Pulau Seram membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat di Ambon. Di daerah ini sudah merupakan hal yang biasa bila seorang pegawai negeri misalnya, setiap hari minggu pergi ke kebun untuk menanam atau menyiangi pohon-pohon cengkeh miliknya. Permintaan jasa angkutan yang cukup tinggi menyebabkan seorang pegawai negeri, setelah jam kerjanya merangkap sebagai penumpang mobil penumpang.

Agama yang dianut oleh Orang Ambon umumnya adalah Islam dan Kristen. Jumlah penduduk Ambon yang menganut agama Islam dan Kristen cukup berimbang. Agama Islam masuk ke Pulau Ambon pada saat pemerintahan Empat Perdana di Jazirah Hitu, yaitu sekitar abad XV. Agama Kristen di Ambon diperkenalkan oleh Bangsa Portugis pada sekitar abad yang sama. Kerukunan antar umat beragama di daerah ini cukup baik. Pada hari-hari besar agama masing-masing masyarakat yang berbeda agama saling mengunjungi satu dengan yang lain. Ada semacam perjanjian tidak tertulis yang menurut ceritanya berasal dari nenek moyang mereka, bahwa mereka boleh berbeda agama tetapi harus selalu menjaga kerukunan, karena mereka berasal dari satu keturunan. Sistem "pela" atau hubungan sosial antar dua kelompok masyarakat khas Ambon, juga berkaitan dengan keagamaan. Dua kelompok masyarakat yang saling berbeda agama dipersatukan dalam sistem pela ini. Berdasarkan pemeluk agamanya desa-desa di Pulau Ambon seolah-olah terbagi dua yaitu desa-desa yang penduduknya

beragama Islam dan desa-desa yang beragama Kristen.

C. KEHIDUPAN EKONOMI

Mata pencaharian penduduk Pulau Ambon cukup beragam, yaitu sebagai petani, nelayan, pedagang, pekerja di sektor industri, pegawai negeri dan lain-lain. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 1990, penduduk Pulau Ambon yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sekitar 1.206 jiwa. Mereka terdiri atas pegawai negeri sipil daerah maupun pegawai negeri sipil pusat.

Sementara itu dalam sejarah dunia secara umum Maluku dan Pulau Ambon khususnya dikenal karena rempah-rempahnya yaitu cengkeh dan pala. Tetapi akibat ekspedisi *hongitochten* yang memusnahkan sebagian tanaman itu telah mematikan peranan Maluku dalam bidang pertanian rempah-rempah ini. Sekarang Maluku tidak lagi menjadi satu-satunya penghasil rempah-rempah. Walaupun masih mereka tanam, tetapi relatif kecil jumlahnya. Jenis tanaman lain yang ditanam adalah kelapa dan kopi. Adapun panen tanaman pala dapat dinikmati hasilnya oleh penduduk tiga kali dalam setahun. Sedangkan tanaman pohon cengkeh panen hanya satu kali dalam setahun. (Monografi Daerah Maluku : 1977).

Sektor peternakan umumnya di Pulau Ambon masih dalam proses pertumbuhan. Ternak yang dipelihara penduduk antara lain sapi, kambing, babi dan unggas/ayam. Dilihat dari perkembangan populasi ternak yang ada, maka jumlah sapi pada tahun 1989 tercatat sebanyak 553 ekor, kemudian pada tahun 1990 berkembang menjadi 575 ekor, ini berarti selama kurun waktu satu tahun kenaikan mencapai 3,98%. Sedangkan ternak kambing pada tahun 1989 berjumlah 396 ekor, menjadi 415 ekor pada tahun 1990, ini mengalami kenaikan sebesar 4,8%. Khususnya populasi babi ternyata mengalami kenaikan pula sekitar 7,16% yaitu dari jumlah 374 ekor pada tahun 1989 menjadi 4.012 ekor pada tahun 1990. Begitu pula dengan populasi ternak ayam.

Penduduk Ambon yang bekerja di sektor industri cukup banyak. Kegiatan industri di daerah ini dapat digolongkan menjadi 5 kelompok, yaitu industri pangan, industri sedang/ besar, industri kimia, bahan bangunan, industri logam, dan industri jasa serta industri kerajinan rumah tangga dan umum. Penduduk Pulau Ambon yang menggeluti pekerjaan industri pangan berjumlah sekitar 357 orang. Jenis-jenis pekerjaan tersebut antara lain pabrik-pabrik roti/kue; kerupuk; mie; tahu/tempe; kopi bubuk; es cream; lemonade; kecap manis; cuka makan; es balok. Selain itu ada pula yang bekerja di pengasapan ikan; pengelolaan daging dan pembekuan ikan. Selanjutnya pekerja di kelompok industri sedang/besar jumlahnya sekitar 225 orang yang meliputi konfeksi penjahit, kasur bantal, tenun ikat, perajut/sulaman, pencetakan dan penyempurnaan kain sablon dan pembuat sepatu. Adapun pekerja di kelompok kimia dan bahan bangunan jumlahnya sekitar 1.106 orang antara lain sebagai pengisi minyak kayu putih; kap salon; tukang gigi; penjual jamu; penjual lilin; vulkanisir ban; di perekaman pita kaset; di photo studio; di foto copy; di percetakan dan penerbitan. Kemudian di penggergajian kayu, mebel kayu/rotan; di pabrik batu bata; pabrik tegel; pabrik semen; pabrik genteng beton dan pilar. Penduduk yang bekerja pada kelompok industri logam dan jasa jumlahnya sekitar 301 orang meliputi di perbengkelan kendaraan bermotor termasuk sepeda motor; pembuatan alat pertanian/pandai besi; di perbengkelan las dan kontruksi; sebagai pembuatan barang-barang kaleng; penservis accu dan elektronik. Sedangkan pekerja di kelompok industri kerajinan jumlahnya sekitar 154 orang. Jenis pekerjaan mereka antara lain sebagai perajin emas/perak; perajin kerang; reparasi lonceng; pembuat galangan kapal rakyat; pengukir kayu; dan pembuat kaca. Dalam data tersebut tampak dari lima kelompok industri yang telah menyerap tenaga kerja sekitar 2.143 orang. Kelompok yang paling dominan adalah industri kimia dan bahan bangunan, kemudian kelompok industri pangan/bahan makanan, diikuti oleh industri logam dan jasa.

Dilihat secara geografis letak Pulau Ambon dikelilingi oleh laut, karena itu tidak heran kalau penduduknya banyak pula yang hidup sebagai nelayan, baik sebagai buruh nelayan atau pemilik kapal. Di sektor perikanan nelayan mempunyai andil cukup besar dalam peningkatan pendapatan regional daerah, sekaligus ikut menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dikatakan cukup dibanggakan. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah nelayan di wilayah ini pada tahun 1989 dan tahun 1990 mengalami perubahan yaitu, dari 4.306 nelayan menjadi 4.619 nelayan. Sarana penangkapan ikan yang digunakan adalah perahu tak bermotor dengan jumlah sekitar 2.059 buah pada tahun 1989, kemudian berkembang menjadi 2.063 buah atau 0,19% pada tahun 1990. Sedangkan jumlah perahu bermotor (motor tempel) pada tahun 1989 jumlahnya sekitar 68 buah dan tahun 1990 bertambah menjadi 72 buah atau 5,9%. Sementara itu kapal motor mengalami penambahan menjadi 203 buah. Adapun alat penangkapan ikan yang paling menonjol dipakai oleh nelayan adalah pancing tonda dan jaring insang payang. Walaupun demikian banyak pula yang menggunakan alat pukat cincin, *huhate pole* dan *line* serta pukat pantai.

Jenis ikan yang diperoleh para nelayan antara lain ikan-ikan cakalang/tuna; tongkol; selar; layang; kembung; julung; lemuru dan udang. Kemudian ikan tersebut dijual oleh nelayan baik kepada konsumen maupun ke pabrik industri kecil dan pabrik perusahaan pengalengan ikan. Biasanya ikan-ikan ini oleh pabrik diproduksi dengan cara pengeringan, penggaraman, pengasapan dan pembekuan. Berdasarkan data yang diperoleh volume pemasaran ikan segar di Pulau Ambon umumnya dan di Kotamadya Ambon khususnya pada tahun 1990 sebanyak 1.140,7 ton yang menghasilkan nilai produksi ikan segar yaitu sekitar Rp. 195.265.000,—. Dengan kata lain untuk nilai produksi ikan segar ini cukup dapat dibanggakan.

D. KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA

Suku bangsa asli Pulau Ambon adalah Orang Ambon. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar penduduk di daerah ini adalah bahasa Melayu Ambon. Bahasa ini sebagai bahasa pemersatu dari desa-desa yang kadang-kadang berlainan bahasanya. Kehidupan sosial antar warga masyarakat Ambon terjalin dan terikat oleh ikatan-ikatan adat, terutama tampak pada sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ini berdasarkan hubungan patrilineal, yang diringi oleh pola menetap virilokal, yaitu menentukan pengantin baru menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat suami (Koentjaraningrat, 1972). Umumnya tempat tinggal mereka saling berdekatan satu sama lain dengan kerabat yang dianggap satu keturunan menurut garis ayah. Kesatuan kekerabatan ini lebih besar dari keluarga batih, dan disebut "mata rumah". Adapun sekelompok mata rumah yang dianggap mempunyai hubungan kekerabatan ini disebut "soa" (Koentjaraningrat, 1971).

Hubungan kekerabatan pada masyarakat Ambon di desa-desa berdasarkan pembagian soa sangat teguh dipertahankan. Hubungan masyarakat satu soa dianggap dan dipercaya mempunyai hubungan geneologis satu dengan lainnya, walaupun pada kenyataannya saat ini mereka berbeda nama keluarganya. Anggapan-anggapan inilah yang sangat teguh dipertahankan.

Organisasi sosial yang bersifat formal dan dilakukan oleh masyarakat di Kepulauan Ambon baik di kota maupun di desa antara lain PKK, organisasi pemuda, keagamaan dan kesenian. Induk organisasi sosial itu adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Lembaga itu merupakan perkembangan dari Lembaga Sosial Desa (LSD). Dalam perkembangannya berdasarkan keputusan Presiden RI No. 28 Tahun 1990, LSD disempurnakan dan ditingkatkan fungsinya menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Organisasi PKK merupakan salah satu seksi dalam LKMD, yang dalam struktur organisasinya, isteri kepala desa menjabat

sebagai ketua penggerak PKK. Dengan demikian secara keorganisasian desa selalu berhubungan dengan efektif dan efisien, sehingga kemajuan organisasi dapat berjalan lancar.

Program pendidikan kesejahteraan keluarga memiliki program terpadu yang disebut 10 segi pokok PKK. Sepuluh segi pokok itu adalah (1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; (2) gotong royong; (3) sandang; (4) pangan; (5) perumahan dan tata laksana rumah tangga; (6) pendidikan ketrampilan; (7) kesehatan; (8) mengembangkan kehidupan koperasi; (9) kelestarian lingkungan hidup, dan (10) perencanaan sehat. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan dukungan dari pengurus dan anggota yang diambil dari warga desa atau ibu rumah tangga.

Dalam rangka realisasi program tersebut, setiap satu bulan sekali diadakan pertemuan di balai desa, yang dihadiri oleh pengurus dan anggota PKK. Selain itu, di wilayah desa/kampung juga diadakan pertemuan adapun waktunya ditentukan secara bergilir. Tempat pertemuan itu biasanya di rumah kepala desa atau di rumah tangga yang ditunjuk. Pertemuan tersebut biasanya membicarakan masalah pelaksanaan program kerja serta memberi informasi dari pemerintah. Untuk mengikat pertemuan yang dilakukan setiap bulan itu, diadakan arisan. Kegiatan lain dari PKK adalah membantu kegiatan posyandu yaitu penimbangan anak balita, memberi informasi tentang kesehatan dan makanan yang bergizi. Selanjutnya memberi pendidikan atau ketrampilan kepada anggota. PKK seperti P4, menyulam dan menganyam. Di samping itu ikut melakukan kegiatan pelestarian lingkungan seperti menanam tanaman apotik hidup atau berkebun dan beternak tiram serta beternak ikan.

Untuk menyalurkan aspirasi generasi muda dibentuk suatu wadah yang disebut Karang Taruna. Anggota organisasi tersebut adalah pemuda-pemudi yang terdapat di wilayahnya. Organisasi Karang Taruna ini anggota dan pengurusnya merupakan dari perkumpulan *jojaro* dan *ngungare*. Kegiatan lain yang dilakukan organisasi ini antara lain olah raga, seperti sepak bola, bola voli, tenis meja dan bulutangkis, serta menga-

dakan kegiatan paduan suara/fokl song. Selain itu organisasi Karang Taruna juga melakukan kerjasama atau membantu di antara kegiatan para ibu PKK. Kegiatan tersebut adalah membantu membuat dan merawat atau memelihara ternak tiram dan ternak ikan, serta berkebun. Dalam kegiatan ini tenaga pemuda-pemudi sangat dibutuhkan oleh organisasi PKK tersebut. Biasanya dalam aktifitas tersebut pemuda-pemudi yang bersangkutan mendapat imbalan berupa uang lelah, tetapi uang tersebut tidak untuk dimiliki secara pribadi, melainkan untuk mengisi kas dari organisasi Karang Taruna yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan tujuan uang kas itu digunakan untuk keperluan anggota.

Sementara itu organisasi sosial yang bernafaskan Islam pada masyarakat di Kepulauan Ambon antara lain organisasi Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Program kedua organisasi itu ditujukan kepada pendidikan dakwah Islamiah. Untuk melaksanakannya diadakan pengajian rutin dan mendirikan sekolah-sekolah Islam. Selain ditujukan dalam pendidikan dakwah juga ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat umum. Misalnya mengadakan bakti sosial, dengan memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, orang-orang jompo, dan mengadakan arisan di antara pengurus dengan sesama anggotanya. Begitu pula dengan organisasi sosial keagamaan berdasarkan agama Kristen, aktivitasnya tidak jauh berbeda dengan organisasi keagamaan berdasarkan Islam tersebut.

Organisasi sosial yang dikembangkan oleh masyarakat Maluku pada umumnya dan masyarakat Kepulauan Ambon khususnya tidak hanya organisasi formal saja, melainkan juga organisasi informal. Pada masyarakat Ambon terdapat ikatan adat yang penting, yaitu organisasi sosial "pela". Pela adalah ikatan persahabatan atau kerjasama antar warga dari dua desa atau lebih berdasarkan perjanjian/sumpah adat. Dalam persatuan persahabatan atau kerjasama ini para anggotanya mempunyai pelbagai kewajiban satu terhadap yang lainnya. Tetapi juga dapat mengharapkan bantuan secara spontanitas dari

sesama anggota pela dalam keadaan bahaya atau kesusahan. Hal ini berlaku baik di desa-desa yang penghuninya beragama Islam maupun beragama Kristen. Sistem pela ini ada dua macam, antara lain "pela tempat sirih" dan "pela keras" atau "pela batu karang" tetapi sering pula disebut "pela tumpah darah". Kedua pela tersebut berbeda, karena alasan terwujudnya organisasi ini berdasarkan kesepakatan bersama antar desa yang bersangkutan sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan.

Menurut beberapa informasi dari hasil wawancara dan hasil kepustakaan, pela *tempat sirih* merupakan hubungan kerjasama, yang terbatas pada kewajiban tolong menolong dalam kehidupan sosial ekonomi, seperti bantuan yang terwujud dalam kegiatan membangun balai desa, sekolah, masjid dan gereja; berlaku baik di desa-desa yang penghuninya beragama Islam maupun yang beragama Kristen. Wujud bantuan yang lain adalah ketika musim panen cengkeh, dan panen pala, di mana sesama pela saling tolong menolong dengan menyumbangkan tenaga tanpa imbalan upah dengan harapan yang bersangkutan mengalami hal yang sama. Begitu pula dalam pengangkatan raja/lurah, kematian dan musibah. Selain hubungan kerjasama tersebut, antar anggota/warga yang pernah bertikai *baku* dalam satu *pela* itu dibolehkan saling kawin. Sedangkan bentuk *pela tumpah darah* terwujud dalam hubungan kerjasama antar anggota yang lebih luas, yaitu selain kerjasama dalam tolong menolong, juga ada larangan menikah dengan sesama pela, karena anggota sesama pela ini dianggap sebagai kerabat. Apabila larangan tersebut dilanggar maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sosial, yaitu dikucilkan atau diusir dari desa asalnya.

Pada umumnya sekitar 10 tahun sekali setiap organisasi pela melakukan kegiatan '*panas pela*', yaitu suatu upacara adat untuk memperingati generasi yang berikutnya. Biasanya yang hadir dalam upacara ini adalah tokoh adat dari desa-desa yang bersangkutan, antara lain *raja*, *aman*, *pemangku adat* atau *tuan tanah*, *kepala desa* dan warga masyarakat yang ber-

sangkutan. Dalam pelaksanaan upacara ini semua peserta memakai pakaian adat dan dipimpin oleh raja. Adapun tujuan upacara tersebut adalah untuk mempererat hubungan antar pela yang bersangkutan sehingga antar anggota sesama pela dapat lebih saling mengenal satu dengan lainnya.

Organisasi sosial yang masih dilakukan oleh masyarakat Ambon adalah kegiatan "marsohi" atau gotong royong. Kegiatan marsohi ini masih ditemukan di Ambon dan di Seram. Sementara itu kegiatan marsohi ada beberapa macam, misalnya gotong royong dalam membangun rumah baru warga desa. Dalam kegiatan ini antarwarga yang bersangkutan saling membantu dengan menyumbangkan tenaga kerja tanpa mengharapkan imbalan berupa upah/uang. Begitu pula pada musim panen cengkeh atau pala. Adapun marsohi yang lain adalah pada kegiatan bersih desa. Sebelum kegiatan tersebut dilakukan warga desa yang bersangkutan mengadakan upacara adat. Biasanya upacara bersih desa ini dipimpin oleh seorang pemangku adat yang dikenal dengan sebutan "*tuan tanah*". Apabila di antara warga desa tidak menghadiri kegiatan ini tanpa alasan tertentu maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sosial. Sanksi tersebut berupa kewajiban membayar denda natura, antara lain hasil hutan, kayu dan buah kelapa. Apabila yang bersangkutan tidak sanggup membayar denda ini, dapat digantikan dengan sejumlah uang. Sementara itu besarnya jumlah uang atau natura tidak ditentukan dengan pasti. Biasanya denda tersebut digunakan oleh warga setempat untuk kepentingan pembangunan desa. Pada umumnya masyarakat Ambon ini menjalankan aktivitas tersebut, apabila di antara warga tidak menjalankannya dengan baik, maka dipercayakan akan ada akibat buruk yang dapat menimpa desa yang bersangkutan antara lain timbul wabah penyakit, ada yang mati, ada panen yang gagal.

Kegiatan bersih desa ini pada umumnya dilakukan oleh warga desa yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen. Biasanya bersih desa dilakukan pada hari besar agama yang bersangkutan, seperti pada hari besar agama Islam antara

lain pada waktu menjelang bulan puasa, Maulid Nabi Muhammad s.a.w, Isra' Mi'raj dan Hari Raya. Begitu pula pada hari besar agama Kristen kegiatan bersih desa dilakukan menjelang hari Paskah, Kenaikan Isa Almasih, Hari Natal dan pada hari-hari nasional.

Organisasi informal lain yang masih aktif dilakukan oleh masyarakat Ambon adalah organisasi yang terdiri atas pemuda-pemudi yang sudah dewasa dan belum kawin, organisasi ini disebut 'jojaro'. Di samping itu ada perkumpulan pemuda yang belum kawin dinamakan 'ngungare'. Setiap anggota perkumpulan ini diwajibkan membayar uang iyuran sekitar Rp 1.000,— setiap bulan. Uang iyuran tersebut digunakan memenuhi kebutuhan perkumpulan yang bersangkutan. Kedua perkumpulan ini selain melakukan kegiatan olah raga, paduan suara/folk song, juga berpartisipasi dalam pembangunan desa, kegiatan bersih desa serta dalam kegiatan pesta perkawinan sebagai penerma tamu. Apabila salah satu anggota jejaro menikah dengan pemuda dari luar desa, maka anggota-anggota jojaro atau ngungare yang lain dapat menghalangi jalannya pelaksanaan pernikahan tersebut, jika yang bersangkutan tidak membayar denda berupa kain putih satu bal. Denda itu dapat diganti dengan uang. Apabila tuntutan mereka belum dilunaskan maka si pengantin wanita tidak diijinkan meninggalkan desa asal. Dalam hal ini ngungare membantu jojaro dan mengawasi pembayaran tuntutan mereka. Di samping itu bentuk perkumpulan yang lain adalah arisan, baik dalam jangka mingguan atau bulanan, tergantung kebutuhan warga yang lain bersangkutan. Arisan yang dilakukan warga dapat berwujud uang atau barang. Sedangkan tujuan arisan ini adalah untuk menabung, selain di antara warga yang bersangkutan dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya.

Di antara anggota dari perkumpulan jojaro dan ngungare ini juga merupakan anggota dari organisasi karang taruna. Wujud hubungan antar kedua organisasi tersebut antar lain kerjasama dalam bidang keagamaan, seperti melakukan kegiatan mengaji atau kebaktian bersama; di bidang sosial, seperti ke-

giatan unit desa dan membantu tenaga untuk membangun mushola dan gereja; dan di bidang ekonomi kegiatan yang dilakukan adalah arisan dan membantu kegiatan Koperasi Karang Taruna yang bersangkutan. Begitu pula dalam bidang olah raga, antar kedua organisasi ini melakukan pertandingan-pertandingan antara lain sepak bola, voli dan bulu tangkis. Umumnya kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung pada hari besar agama Islam, seperti menjelang bulan puasa, Maulid Nabi Muhammad s.a.w, Isra' Miraj, dan pada hari besar agama Kristen, seperti hari Paskah, Kenaikan Isa Almasih, serta Hari Natal. Begitu pula dengan kegiatan olah raga, umumnya berlangsung menjelang hari besar seperti memperingati hari kemerdekaan dan sebagainya. Tujuan hubungan kerjasama antar kedua organisasi tersebut selain untuk menyalurkan bakat dan mempererat hubungan antar warga untuk lebih saling mengenal satu dengan lainnya, juga untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan dapat mewujudkan prestasi.

Masyarakat Ambon selain melakukan kegiatan sosial, juga melakukan kegiatan kesenian tradisional. Kesenian yang khas pada masyarakat ini adalah seni tari, seperti tari lenso yang merupakan tari pergaulan. Kemudian tari sagu, tari memetik cengkeh dan tari pala. Anggota perkumpulan-perkumpulan kesenian tradisional ini adalah muda-mudi atau jojaro dan mongare yang belum kawin. Biasanya perkumpulan kesenian itu mengadakan pertunjukkan pada waktu pesta besar atau pada hari-hari besar nasional.

Organisasi sosial baik formal maupun informal pada masyarakat Ambon ternyata banyak manfaatnya. Di antar warga yang bersangkutan dapat saling bertatap muka atau saling mengenal, warga dapat mengakrabkan persaudaraan, dapat saling tukar menukar informasi dan pengalaman yang mereka miliki. Dengan adanya pertukaran pengalaman itu warga dapat menambah pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan program organisasi. Sehingga gerak organisasi menjadi lebih maju dan bermanfaat bagi organisasi itu sendiri, serta sekaligus ikut menunjang program pemerintah.

E. LATAR BELAKANG SEJARAH PULAU AMBON

Adalah kurang tepat apabila sub bab ini langsung membicarakan perkembangan sejarah Pulau Ambon tanpa menyinggung kaitannya dengan sejarah Maluku secara umum. Istilah Maluku senantiasa berbeda-beda artinya di dalam perkembangannya. Pada mulanya istilah ini hanya dipergunakan untuk menyebutkan kerajaan-kerajaan yang terdapat di daerah Maluku Utara saja, yang muncul dari boldan-boldan sebagai suatu bentuk politik yang dikuasai oleh kolano atau raja. Boldan ini merupakan bentuk awal dari kerajaan di Maluku. Kerajaan yang dimaksudkan adalah Maloko Boldan Ternate; Maloko Boldan Tidore; Maloko Boldan Bacan dan Maloko Boldan Jaiolo. Kemudian istilah Maluku tersebut dipergunakan untuk menamakan semua gugusan pulau-pulau yang terbentang antara Sulawesi dan Irian Jaya oleh pemerintah Hindia pada abad ke 19. Istilah Maluku yang terakhir terbatas pada pulau-pulau sesuai dengan batas ketataprajaan yang ditentukan Pemerintah Republik Indonesia. Menurut sumber kepustakaan pedagang Cina pada permulaan abad Masehi sudah menyebut istilah itu dan yang dapat diperkirakan artinya daerah penghasil cengkeh.

Sebelum bangsa Portugis dan bangsa Belanda datang di Maluku, sekitar pertengahan abad ke 15 kerajaan-kerajaan di Maluku seperti Kerajaan Ternate dan Kerajaan Bacan telah memainkan peranan dalam sejarah. Peranan ini erat hubungannya dengan perdagangan cengkeh dan pala, yang pada waktu itu hanya dihasilkan di kerajaan-kerajaan tersebut dan di Kepulauan Banda.

Daerah kekuasaan kerajaan-kerajaan tersebut mengalami perkembangan setelah agama Islam masuk ke sana. Pada abad ke 15 pusat-pusat agama Islam terdapat di Pulau Jawa dan di Maluku. Dari tempat-tempat tersebut pedagang yang beragama Islam meluaskan agamanya ke pelbagai tempat di Indonesia, termasuk kerajaan tersebut di atas. Pada mulanya agama ini dianut oleh pejabat-pejabat di istana yang bersangkutan mulai dari kolano sampai pejabat-pejabat lainnya bersama anggota keluarga mereka. Kemudian diikuti oleh lapisan lain dalam

masyarakat. Pedagang-pedagang yang membawa agama Islam ini tidak hanya berasal dari Indonesia saja melainkan juga dari pelbagai tempat di kota-kota pelabuhan India sebelah selatan, Persia dan lain-lainnya.

Perluasan agama Islam ke daerah-daerah di Maluku Utara sangat banyak kaitannya dengan perdagangan cengkeh. Cengkeh pada masa itu hanya dihasilkan di pulau-pulau tertentu saja di Maluku Utara. Barang ini sangat dibutuhkan sebagai bahan rempah-rempah dalam makanan, dan juga untuk mengawetkan makanan. Khususnya daerah-daerah yang iklimnya selalu berbeda-beda seperti di Eropa dan Cina di mana makanan sangat cepat rusak apabila tidak diawetkan dengan ramuan-ramuan tertentu. Cengkeh merupakan salah satu dari ramuan pengawet di samping pala dan lada. Rempah-rempah itu juga berkhasiat untuk dijadikan obat-obatan. Dengan demikian tidak mengherankan bahwa cengkeh menjadi barang dagangan yang mewah pada masa itu.

Dari sejarah Dinasti T'ang dapat diperoleh keterangan bahwa orang Cina sudah mengenal cengkeh sejak abad ke 7 Masehi, jadi bersamaan dengan zaman berdirinya Kerajaan Sriwijaya (7 – 12 M), ini berarti mereka sudah mengetahui jalan laut menuju daerah ini. Sejauh mana hubungan antara Maluku dan Sriwijaya tidak ada sumber-sumber yang jelas. Namun pada masa jayanya, Sriwijaya pada waktu itu sudah menjalin hubungan dengan Cina. Yang jelas pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dan Maha Patih Gajah Mada dari Kerajaan Mojopahit nama *Abwan* atau *Ambon* dan *Wandan* atau *Banda* disebut-sebut dalam kitab sejarah kerajaan tersebut. Nama ini muncul tentu disebabkan karena hubungan perdagangan di samping hubungan politik daerah-daerah tersebut, sudah terjalin dengan Mojopahit. Mereka memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Mojopahit melalui pengiriman upeti. Mengenai hal ini ada keluarga-keluarga Ambon yang mengatakan bahwa menurut sejarah nenek moyang mereka berasal dari Mojopahit. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh keluarga-keluarga yang memakai nama Patti, Pattikawa dan Pattiweal

sebenarnya dianggap berasal dari Jawa Timur, yaitu dari sekitar daerah Tuban. Dalam hal ini hubungan dengan Mojopahit sudah jelas ada.

Situasi kesatuan politik dan perkembangan di daerah Maluku pada abad ke 13 tampak ketika berdiri Kerajaan Jailolo, Ternate, Tidore dan Bacan. Keempat kerajaan ini mula-mula dikenal dengan nama Maloko atau Maluku. Kehadiran keempat kerajaan ini pada satu daerah yang sama mengakibatkan timbul keinginan masing-masing untuk saling berusaha menjadi penguasa tunggal. Untuk meredakan situasi yang tegang antara kerajaan-kerajaan itu, maka pada pertengahan abad ke 14 diadakan musyawarah antara keempat Kolano, di Pulau Mortir. Musyawarah ini berhasil menentukan batas-batas wilayah masing-masing kerajaan.

Sejak abad ke 15 kerajaan-kerajaan tersebut mulai mengadakan perluasan kekuasaan. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidorelah yang memainkan peranan terpenting dalam perluasan daerah itu. Kerajaan Bacan tetap terpusat di Pulau Bacan dan sekitarnya. Kemudian Kerajaan Jailolo di Pulau Halmahera dimasukkan ke dalam kekuasaan Kerajaan Ternate maupun Kerajaan Tidore. Daerah perluasan Kerajaan Ternate adalah sekitar pulau-pulau yang terbentang antara Pulau Sulawesi dan Irian Jaya.

Musyawarah Mortir berhasil meredakan situasi untuk sementara, tapi kemudian persaingan terus berlangsung. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore muncul sebagai dua raksasa yang menguasai Maluku waktu itu. Kedua kerajaan tersebut masing-masing berusaha untuk muncul sebagai penguasa tunggal di daerah ini, sampai dengan kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1512 di Maluku. Baik Ternate maupun Tidore berusaha untuk mendapatkan dukungan dari Portugis, agar salah satu di antara keduanya dapat muncul sebagai penguasa tunggal. Ternyata yang berhasil bekerjasama dengan bangsa Portugis adalah Kerajaan Ternate, itulah sebabnya maka Kerajaan Tidore bekerjasama dengan bangsa Spanyol yang tiba di Maluku pada tahun 1521. Tetapi gabungan Tidore-Spanyol dapat

dikalahkan oleh gabungan Ternate—Portugis, sehingga akhirnya Spanyol meninggalkan daerah Maluku untuk selamanya.

Setelah Kerajaan Tidore tidak mempunyai arti lagi bagi Kerajaan Ternate, sebaliknya persahabatan Kerajaan Ternate dan orang Portugis akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi. Terutama akibat peristiwa pembunuhan Sultan Hairun melalui satu penghianatan yang dilakukan oleh orang Portugis dalam bentengnya Santo Paolo di Ternate. Penghianatan ini dibalas oleh Baab'Ullah anak Sultan Hairun yang menggantikannya sebagai Sultan Ternate, sehingga akhirnya pada tahun 1575 bangsa Portugis angkat kaki meninggalkan Ternate untuk selamanya. Pada masa pemerintahan Baab'Ullah dari tahun 1570—1583 Kerajaan Ternate mengalami kemajuan yang luar biasa, ini berkat ketrampilan politik Sultan ini.

Seorang Padri yang pernah datang mengunjungi Maluku antara tahun 1550—1593 bercerita tentang luasnya Kerajaan Ternate yang terdiri atas 72 buah pulau yang terbentang antara Mindanau di sebelah utara sampai di Bima dan Corre (Corre mungkin di Sumbawa atau di sebelah selatan. Irian merupakan batas di sebelah timur dan Daerah Kepulauan Mathao atau Sulawesi menjadi batas di bagian barat). Menurut R.Z. Leiris (tahun 1971) wilayah tersebut di atas masih utuh hingga sekitar pertengahan abad ke XVII. Dari kesaksian padri Katholik tersebut dapatlah dibayangkan betapa luas Kerajaan Ternate ini.

Pada waktu itu struktur pemerintahan yang digunakan demi terpeliharanya kelangsungan hidup kerajaan itu tentu sesuai dengan kebutuhannya sebagai kerajaan kepulauan. Pucuk pimpinan kerajaan berada di tangan Sultan yang dibantu oleh tiga pejabat tinggi, yaitu "*jujugu*" (semacam menteri pertama), "*kapitan laut*" (yang memimpin armada kerajaan atau hong), dan "*hukom*" atau *apperrechter* yang disamakan dengan hakim tinggi. Lalu ada pula dewan, yaitu "*Soasiwa*" suatu dewan bangsawan yang perannya sangat menentukan dalam pemerintahan Kerajaan Ternate. Masalah pengangkatan sultan baru

adalah hak soasiwa, dan segala keputusan yang diambil oleh ketiga pejabat tinggi lainnya harus mendapat persetujuan soasiwa. Menurut Valentijn (Monografi, 1971) selain struktur pemerintahan pusat di atas, maka pemerintahan daerah dipimpin oleh para "*sangaji*" yang berkedudukan di kota-kota pelabuhan, jadi erat hubungan dengan perdagangan. Para sangaji ini dibantu oleh kepala-kepala desa. Di samping itu mereka yang berkewajiban mengumpulkan cengkeh-cengkeh rakyat, mereka ini pula yang berhubungan dengan para pedagang, karena itu mereka sering disebut sebagai orang kaya.

Di samping struktur pemerintahan Kerajaan Ternate tersebut di atas kerajaan ini masih memiliki pula beberapa wilayah taklukan seperti Ambon, Jailolo dan sebagainya. Tiap wilayah taklukan tersebut dikepalai oleh seorang Gimelaha. Demikianlah sekelumit sejarah Kerajaan Ternate yang meliputi hampir seluruh daerah Maluku pada masa jayanya. Kerajaan tersebut mengalami masa suramnya setelah VOC mulai berkuasa.

Salah satu sebab bangsa barat datang di Maluku karena dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah. Maluku disebut kepulauan rempah-rempah karena cengkeh dan pala telah mengharumkan nama daerah ini di atas panggung sejarah baik nasional maupun internasional. Rempah-rempah dari Maluku telah berhasil mempesona *conquistador* (penakluk) Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris. Niaga nasional inilah yang mendorong hasrat mereka berupaya untuk memilikinya. Menurut Moh Ali (tahun 1963) tentang niaga nasional, Maluku merupakan ujung pangkal gerak niaga yang memusat di Sriwijaya sampai sekitar tahun 1300; di Mojopahit sampai tahun 1400; di Malaka sekitar tahun 1511; di Banten, Aceh dan Makasar dalam abad XVII. Menurut R.M. Soebantajo (Monografi, 1971) sebab bangsa Portugis datang ke Indonesia ialah untuk menyerang Islam dari belakang, karena pusat-pusat penimbunan rempah-rempah waktu itu dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam. Tetapi menyerang Islam dari belakang mempunyai satu tujuan yaitu agar rejeki tersebut dapat direbut

dari pihak Islam sekaligus menghancurkan ekonomi Islam agar mudah ditaklukan. Dengan demikian motif utamanya adalah masalah agama dan keuntungan.

Motif tersebut di atas itulah yang telah menghantarkan bangsa Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Kemudian d'Albuquerque pada akhir tahun yang sama juga mengirimkan satu ekspedisi ke Maluku di bawah pimpinan Antoni d'Abreu. Dalam ekspedisi ini menurut Vlekke, d'Abreu diperintahkan untuk menghilangkan sejauh mungkin tindakan mereka sebagai militer dan memperkenalkan diri sebagai pedagang. Jelaslah di sini, bahwa faktor ekonomi merupakan alasan kehadiran mereka di Maluku. Ekspedisi ini mengirimkan dua buah kapal, satu kapal berhasil tiba di Banda dan kembali dengan mengisi penuh muatan rempah-rempah. Sedangkan kapal yang satu lagi di bawah pimpinan Fransisco Serrau terdampar di Pulau Penyu atau Lusipara, dengan bantuan para nelayan mereka selamat dan diantarkan ke Nusatelu di Jazirah Hitu Pulau.

Di Maluku bangsa Portugis sempat mendirikan sebuah benteng di Pikapoli dengan seizin masyarakat setempat, yaitu antara Negeri Hitu Lama dan Mamala di Pulau Ambon sekarang. Selain itu ada beberapa benteng dipindahkan tempatnya, yang terakhir adalah di daerah Honipopu dengan nama Kota Laha. Benteng ini merupakan benteng terakhir yang didirikan oleh Portugis. Benteng pertama didirikan di Ternate pada tahun 1521. Kehadiran Portugis di Ternate waktu itu memang situasinya memungkinkan, sebab Ternate bertentangan dengan Tidore, sehingga Ternate bekerjasama dengan Portugis. Namun kemudian pada tahun 1575 Portugis diusir dari Ternate akibat pengkhianatan terhadap Sultan Hairun, seperti yang telah diuraikan di atas. Sedangkan Spanyol yang tiba di Maluku pada tahun 1521 berhasil diusir dari Maluku sekitar tahun 1530. Sedangkan kedatangan bangsa Belanda di Maluku ini merupakan akibat dari tindakan Raja Philips II dari Spanyol yang bermusuhan dengan Belanda pada waktu yang sama berdaulat atas Portugis, sejak tahun 1583. Masalah tersebut diawali dengan tindakan Philips II dengan menutup Lisabon bagi

pedagang Belanda yang menduduki peran sebagai pedagang transito bagi Eropa Utara dan Eropa Selatan. Tindakan ini mempercepat usaha Belanda untuk mencari jalan ke daerah rempah-rempah.

Pada tahun 1599 Jacob Neck yang diwakili oleh Wybrand Van Warwyk berangkat dengan delapan buah kapal ke Indonesia. Mereka tiba di Banten, waktu itu sedang timbul peperangan dengan bangsa Portugis, sehingga dengan mudah empat buah kapal Belanda berhasil mengisi muatan penuh. Kemudian empat buah kapal yang lain di bawah pimpinan Van Waerwyk tiba di Maluku pada akhir tahun 1599. Setelah itu kapal-kapal Belanda silih berganti datang ke daerah ini. Sementara itu di pihak lain sekitar tahun 1577 Fransis Drake meninggalkan Plymouth melintasi lautan Pasifik menuju Malaka. Ia berhasil sampai di Ternate pada tahun yang sama dan mendapat sambutan baik dari masyarakat setempat. Ini berarti bangsa Inggris lebih dahulu tiba di Maluku dari pada bangsa Belanda. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa cengkeh dan pala yang menjadi hasil kebanggaan daerah ini merupakan incaran bagi setiap bangsa Eropa untuk datang ke Maluku. Kehadiran berbagai pedagang di daerah ini sudah tentu menimbulkan suatu persaingan yang tidak sehat.

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kerajaan Ternate telah menggunakan orang Belanda untuk menghancurkan bangsa Belanda untuk menghancurkan bangsa Portugis. Demikian pula sebaliknya Belanda memanfaatkan Kerajaan Ternate. Sejak tahun 1605 bangsa Portugis harus menyerahkan pertahanannya di Ambon kepada Steven Van Derhagen dan di Tidore mereka dikalahkan dengan satu armada gabungan dari orang-orang Ternate dan Belanda di bawah pimpinan Cornelis Sebastiansz, sehingga orang Portugis harus meninggalkan Maluku untuk selama-lamanya. Kemenangan Belanda di Ambon atas Portugis inilah yang mengubah nama benteng Kota Laha menjadi Benteng Victoria. Akibat kemenangannya di Ambon, Belanda mengadakan perjanjian pertama dengan rakyat dan pemimpin-pemimpinnya yang terdiri atas tiga pasal, isinya

antara lain : Rakyat berada di bawah perlindungan pegawai VOC. Rempah-rempah tidak dapat dijual kepada siapapun kecuali VOC. Dan kepercayaan atau agama masing-masing tidak boleh diganggu.

Dengan keberhasilan ini Belanda kemudian merencanakan sasaran selanjutnya ke Kepulauan Banda dan Maluku. Setelah berhasil mengalahkan Portugis, muncul pula hasrat yang mendorong VOC berusaha mati-matian untuk menghancurkan Inggris. Pada tahun 1615 benteng Inggris di Kambelo, Pulau Seram berhasil dihancurkan. Persaingan antara dua bangsa ini berjalan terus dan mencapai puncaknya ketika peristiwa pembunuhan orang-orang Inggris di Ambon yang terkenal dengan nama Ambon Masacre.

Kejayaan VOC dalam perluasan kekuasaan ini mengakibatkan pedagang Eropa lainnya yang menjadi saingannya tidak berdaya lagi menghadapi kompeni. Hancurnya saingan-saingan pedagang Eropa lainnya itu bukan berarti VOC akan bebas bergerak melaksanakan operasi monopolinya begitu saja, sebab para pedagang Indonesia lain yang sudah lama mengadakan hubungan dagang dengan Maluku tidak akan membiarkan kehidupan mereka dirampas begitu saja. Pada umumnya dari rakyat Maluku sendiri tidak rela menjual hasil bumi mereka kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan. Pelanggaran-pelanggaran rakyat terhadap perjanjian monopoli VOC ditindak secara kejam oleh Jan Pieters Zoo Coen yang terkenal dengan nama Banda Moord. Akibat peristiwa ini banyak rakyat harus meninggalkan pulaunya sendiri. Di antara mereka ada yang pergi ke Batavia, ke Seram dan ada yang melarikan diri ke Hatuha, sebuah kerajaan Islam yang berpengaruh di Lease. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke Makasar dan menetap di sana. Sejak saat itu Banda dinyatakan sebagai milik VOC.

Di Pulau Ambon terdapat dua jazirah yaitu jazirah Hitu dan jazirah Leitimor yang masing-masing dikuasai oleh sebuah pemerintahan tradisional. Diketahui bahwa Hitu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Ternate. Pemerintah di Hitu dipimpin oleh suatu badan yang disebut Empat Per-

dana. Masing-masing perdana mempunyai gelar selama yang bersangkutan memegang jabatan tersebut. Gelar-gelar itu adalah "Totohatu", "Tanahtumessing", "Nusatapi", dan yang terakhir "Pati Tuban". Keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan di Hitu ditentukan para perdana tersebut, di mana dalam perundingan-perundingan para perdana ini, raja Hitu bertindak sebagai perantara atau penengah dalam musyawarah. Di samping itu pemerintahan sehari-hari dikoordinir oleh tujuh orang pegawai yang masing-masing berkedudukan di suatu *uli* (kesatuan wilayah) di Hitu. Pegawai-pegawai ini mempunyai pembantu sebanyak 30 orang yang disebut "galaran". Selain itu tentu ada kepala-kepala desa biasa.

Pada awalnya kehadiran VOC di Hitu diterima dengan baik. Tetapi karena monopoli VOC sangat menekan timbullah rasa benci masyarakat kepada orang-orang Belanda. Sekitar tahun 1634 hubungan baik antara kedua bangsa ini mulai retak. Hal ini disebabkan perjanjian-perjanjian yang disepakati dengan VOC semata-mata hanya mengenai masalah perdagangan rempah-rempah. Sebaliknya Belanda terlalu jauh turut campur tangan yaitu dalam masalah kehidupan rakyat Hitu. Akhirnya muncul seorang tokoh pemimpin perlawanan yang bernama Kakiali.

Sementara itu di jazirah Leitimor keadaan pemerintahannya agak berlainan dengan jazirah Hitu. Di jazirah ini tidak terdapat sesuatu pemerintahan yang terpusat, keadaannya lebih mendekati keadaan di Banda. Uli merupakan kesatuan-kesatuan yang terbesar dan yang paling berkuasa pada awal abad ke 17 itu adalah Nusaniwe. Kemudian terdapat pula uli-uli Kilang, Soya, Ema, Holang, Hatiwe, Tawiri dan aguala. Masing-masing berdiri sendiri tetapi mengakui kekuasaan VOC yang waktu itu berkedudukan di Ambon dan dikepalai oleh seorang gubernur. Daerahnya dinamakan Gouvernement Van Amboina. VOC di Ambon juga menguasai pulau-pulau lainnya seperti Haruku, Saparua, dan Nusa Laut. Di pulau ini pun hanya terdapat uli-uli saja. Tetapi di pulau ini penduduk di sebelah utara masih memeluk agama Islam, sedang-

kan di sebelah selatan penduduk beragama Khatolik dan Protestan.

Pada tahun 1605 VOC mengadakan penyempurnaan dalam sistem pemerintahan di Leitimor. Gubernur Blok membentuk suatu landraad yang terdiri atas para penguasa uli-uli tersebut. Tugas mereka adalah membantu gubernur dalam memutuskan perkara-perkara yang menyangkut seluruh daerah itu. Namun akibat perlawanan terhadap VOC yang berkobar-kobar sejak tahun 1636, badan ini jarang memainkan peranannya.

Ketika Kakiali memimpin perlawanan di Hitu, ia mengkoordinir seluruh potensi kekuatan di Maluku Tengah, namun akhirnya berhasil ditangkap oleh VOC. Tetapi penangkapan Kakiali mendapat reaksi dari rakyat Hitu dengan menuntut agar Kakiali dibebaskan. Untuk meredakan ketegangan situasi tersebut maka VOC berupaya mencari jalan keluarnya dengan cara diplomasi, yaitu menghubungi Sultan Ternate Hamzah untuk memberitahukan bahwa sumber dari segala ketegangan yang terjadi di Maluku Tengah ialah Gimelaha Luhu dan Gimelaha Lelieto yang merupakan wakil-wakil dari Sultan Ternate di daerah-daerah itu. Pada tahun 1637 gubernur Batavia Jenderal Van Diemen melepaskan Kakiali dari pembuangannya di Batavia.

Setelah dibebaskan, Kakiali tetap bertekat untuk mengusir VOC. Untuk mewujudkan cita-citanya ia mengirimkan panglima Patiwani ke Makasar untuk meminta bala bantuan. Begitu pula dengan Rijali seorang imam dari Hitu di utus ke Makasar dengan tujuan yang sama. Pada saat Kakiali menyusun kekuatannya VOC mengangkat seorang gubernur baru di Ambon yaitu Gerard Demmer untuk mengimbangi situasi itu. Di bawah pimpinan gubernur inilah serangan-serangan dilakukan kepada Kakiali. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1643 VOC berhasil membunuh Kakiali. Belanda merencanakan itu melalui seorang pembunuh bayaran kebangsaan Spanyol yaitu Fransisco de Toira. Setelah peristiwa pembunuhan Kakiali, tentara Hitu mengungsi ke Gunung Kapahaha di bawah pimpinan Patiwani.

Tentara Hitu di tempat pengungsiannya menghimpun kekuatan dan semangat baru. Pada saat itu muncullah pejuang baru, yaitu Tulukabessy dan Patiwani yang berperan sebagai pembantunya. Pada waktu rakyat Hitu dipimpin oleh Tulukabessy Belanda beberapa kali mengadakan penyerangan, tetapi tidak berhasil memusnahkannya. Akibat penghianatan, jalan rahasia menuju puncak Kepahaha dapat diketahui oleh VOC, sehingga benteng pertahanan rakyat Hitu akhirnya jatuh ke tangan VOC. Pada waktu itu Tulukabessy sempat melarikan diri, tetapi ia akhirnya menyerahkan diri karena melihat kekejaman atas tindakan VOC terhadap penangkapan pemuda-pemuda rakyat yang disiksa. Tepatnya tanggal 3 September tahun 1648 Tulukabessy diadili dan menjalani hukuman mati di atas tiang gantungan di halaman Benteng Victoria, di Kota Ambon.

Dalam sejarah Kepulauan Maluku pada umumnya dan Kepulauan Ambon pada khususnya dikenal istilah *stelsel hongi-tochten*. Istilah ini terdiri atas dua kata yaitu *hong* dan *tochten*. *Hongi* artinya armada dan *tochten* berarti pelayaran. *Hongi-tochten* berarti pelayaran dengan satu armada, yaitu armada perang yang terdiri dari perahu-perahu atau kora-kora yang diperintah oleh VOC. Para pendayung adalah rakyat Maluku sendiri, dengan cara memaksa setiap kampung agar menyediakan tenaga pendayung. Armada tersebut diperintahkan VOC menghancurkan pohon-pohon cengkeh agar harganya tetap stabil. Sedangkan perbekalan selama satu setengah bulan itu ditanggung sendiri oleh si pendayung.

Di masa lampau apabila rakyat kepulauan tersebut dilanda perang mereka mempunyai kebiasaan menghancurkan kebun cengkeh di desa atau negeri musuhnya VOC mengambil alih kebiasaan pribumi itu untuk kepentingan politik monopolinya. *Hongi-tochten* berkembang menjadi suatu stelsel ekonomi, di mana di dalamnya terkandung antara lain penebangan atau penghancuran kebun-kebun cengkeh rakyat; kerja paksa; tanam paksa dan penyerahan paksa. Maksud mula-mula *hongi-tochten* adalah untuk menghukum penyelundup yang melanggar hak

monopoli VOC dan untuk menakut-nakuti saudagar-saudagar asing yang masih berniaga dengan orang di Maluku. Selain itu juga untuk membatasi produksi dengan menebang sebagian pohon cengkeh agar harga rempah itu tetap tinggi.

Akan tetapi stabilitas produksi seperti yang diinginkan VOC tersebut sukar dijamin dan kebobolan monopoli tetap terjadi apabila daerah tanaman itu jauh dari jangkauan pengawasan pusat kekuasaan VOC di sekitar Ambon. Oleh karena itu seluruh pohon cengkeh di daerah Maluku Utara dan daerah lainnya dihancurkan, kecuali di Ambon dan Lease. Untuk memenangkan stelsel ekonomi Belanda, maka di Ambon dan sekitarnya harus dilakukan penanaman cengkeh secara besar-besaran supaya dalam waktu yang relatif singkat hasil cengkeh di Ambon dan di sekitarnya sudah dapat menjamin kebutuhan VOC ketika semua pohon cengkeh di luar daerah itu dimusnahkan sama sekali.

Tindakan VOC dengan *hongitochten* telah mendatangkan penderitaan bagi rakyat Maluku, karena tindakan itu tidak hanya terbatas pada penghancuran kebun-kebun rakyat saja, tetapi rakyat diharuskan pula untuk menyerahkan kora-kora atau perahu serta pendayungnya. Untuk melaksanakan *hongitochten* rakyatlah yang disuruh bekerja paksa baik di siang hari, maupun di malam hari. Secara resmi *hongitochten* itu dihapuskan pada tahun 1824 oleh Van der Capeleen, namun Leirissa (tahun 1971) berpendapat *hongitochten* ini berlangsung terus selama VOC dan baru hilang setelah orang Inggris untuk sementara menguasai Indonesia. Dalam sejarah penjajahan Belanda di Indonesia khususnya di Maluku termasuk di Ambon dapat dilihat bahwa kerja paksa, tanam paksa dan penyerahan paksa lahir pertama kali di Maluku. Sedangkan pengembangannya makin menjadi-jadi di bawah asuhan Van Den Bosch pada tahun 1930 di Pulau Jawa.

Menurut pendapat Dr. Cooley (Monografi, 1971) seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, *hongitochten* sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan mental penduduk daerah Maluku. Situasi inilah yang mengakibatkan kecintaan masya-

rakat Maluku terhadap lahan sebagai sumber hidupnya menjadi punah. Masyarakat lebih suka menjual tenaga mereka sebagai serdadu atau sebagai pegawai pemerintah Belanda dari pada mengusahakan tanah-tanah mereka sebagai sumber kehidupan. Menurut Beverswisen dan Gieben (Leirissa, 1975) akibat monopoli stelsel ini telah melumpuhkan sama sekali kekuatan berproduksi dari rakyat dan mematikan hubungan Maluku dengan dunia luar.

Akan tetapi akibat adanya hong-tochten pula rakyat Maluku mulai bangkit melawan Belanda, seperti peristiwa perlawanan tahun 1817. Rakyat telah jenuh dengan tindakan Belanda pada masa sebelum kedatangan Inggris. Sehingga ketika Belanda kembali, rakyat dan pemimpin mereka beranggapan itulah saat yang baik dan alasan yang tepat bagi timbulnya peperangan. Pada tahun tersebut Belanda menugaskan seorang gubernur di Maluku, yaitu Jacob Albertus Middelkoop. Ketika gubernur tersebut bertugas di Maluku, ia telah memerintahkan rakyat Saparua menebang kayu. Mereka diperlukan sewenang-wenang tanpa mendapatkan gaji. Middelkoop memerintahkan agar kayu yang telah dipotong dibawa dan ditimbun di negeri Porto, kemudian rakyat diperintahkan untuk pergi ke Ambon dengan perahu sesuai perintah residen Saparua. Akibatnya rakyat menolak perintah tersebut, mereka menuntut pembayaran lebih dahulu sebelum kayu itu diangkut ke Ambon. Gubernur lalu memerintahkan Belanda yang berada di Saparua untuk datang dan menindas perlawanan rakyat Saparua tersebut.

Karena perlakuan yang kejam dari orang Belanda ini maka benteng Duurstede diserang oleh rakyat di bawah pimpinan oleh Pattimura alias Thomas Matulesy. Penyerbuan tersebut didukung oleh hampir semua rakyat. Pattimura, sendiri mengeluarkan pernyataannya yang berbunyi : "Residen van den Berg telah memperlakukan rakyat sewenang-wenang dan tidak mengindahkan hak-hak mereka, maka selaku kapitan seluruh penduduk Honimoa, Haruku, Nusalaut, Ambon dan lain-lainnya, dan sebagai rakyat Maluku saya mengatakan pada hari

ini bahwa kita telah bersatu dan tidak akan tunduk lagi kepada pemerintah Belanda dan residen-residennya. Kita tidak mengakui lagi kekuasaan penjajah. Demi Allah Yang Maha Adil, kita menyatakan bahwa kita tidak terikat lagi kepada pemerintah kaum penjajah. Mulai saat ini semua pembesar-pembesar Belanda dan kaki tangannya adalah musuh kita. Semua penjajah akan kita hancurkan berdasarkan keyakinan, bahwa kita menentang kelaliman dan membela keadilan serta kebenaran". Isi pernyataan sikap Pattimura ini telah membangkitkan semangat rakyat untuk melawan Belanda. Serangan ke benteng *Duurstede*, telah mengakibatkan musnahnya benteng tersebut bersama penghuninya, termasuk residen van den Berg. Tetapi perjuangan Pattimura dapat dihentikan melalui penghianatan yang memang dimanfaatkan oleh pihak penjajah. Pattimura berhasil ditangkap dan bersama kawan-kawannya dibawa ke Ambon. Pada tanggal 16 Desember tahun 1817 mereka menjalani hukuman mati di tiang gantungan di luar Fort Nieuw Victoria. Yang pertama menjalankan hukuman mati ini adalah Philip Latumahina, kemudian Anthony Rebok, menyusul Said Perintah dan terakhir adalah Pattimura.

Ketegasan sikap Pattimura tersebut sudah terwujud yaitu rakyat kini sudah merdeka. Namun cengkeh dan pala harus pula dipelihara agar tumbuh subur karena itu merupakan satu kewajiban bangsa untuk mewujudkannya dalam masa pembangunan. Demikianlah selintas sejarah Kepulauan Ambon yang tidak terlepas dari sejarah Maluku.

BAB III DESKRIPSI SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL

A. SISTEM PEMERINTAHAN

Di daerah Maluku Tengah umumnya atau Ambon khususnya, prinsip hubungan kekerabatannya berdasarkan hukum genealogis menurut garis keturunan ayah atau patrilineal. Kesatuan sosial setiap komuniti desa di Ambon disebut "negeri" atau "uli-uli". Terbentuknya sebuah negeri dimulai dari adanya kelompok pemukiman kerabat patrimonial setingkat klen atau keluarga luas yang disebut "soa". Beberapa soa bergabung menjadi sebuah "Hena" atau "Aman" yaitu suatu konfederasi sosial politis dalam sebuah desa. Kemudian Hena atau Aman itu membentuk perserikatan lebih besar yang dikenal dengan sebutan negeri atau uli. Dalam hal ini ada dua jenis uli, yakni "Uli Siwa" dan "Uli Lima". Uli lima ini adalah persekutuan lima negeri.

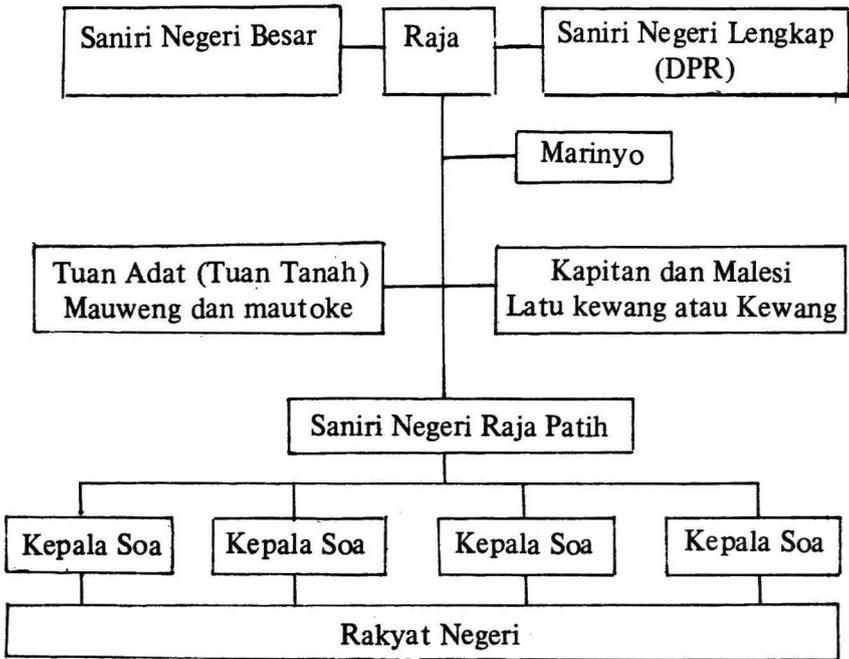
Pada dasarnya semua negeri di Ambon memiliki struktur pemerintahan yang sama. Namun demikian ada juga beberapa negeri yang memiliki perbedaan, karena adanya perkembangan dan pengaruh dari luar. Dalam struktur pemerintahannya setiap negeri dipimpin oleh seorang kepala negeri yang disebut raja. Dalam arti kepala pemerintahan yang tertinggi dari sebuah uli/negeri adalah seorang raja yang bergelar Upu-Latu. Di sam-

ping sebagai kepala uli (negeri), raja juga sebagai kepala adat komunitas negerinya raja di sini merupakan istilah umum untuk kedudukan kepala negeri yang turun temurun sifatnya.

Di bawah raja, duduk kepala soa yang mengepalai kampung-kampung kecil atau bagian dari sebuah negeri. Kemudian ada pula tuan tanah atau tuan adat, *kapitan (malesi)*, *kewang*, *mueweng*, dan *marinyo*. Semua pejabat (aparatus) pemerintahan negeri ini berada dalam suatu dewan musyawarah negeri yang disebut *Saniri Negeri*.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Saniri Negeri dalam rangka mengatur dan memudahkan jalannya pemerintahan negeri, maka dewan ini digolongkan ke dalam tiga kelompok yaitu *Saniri Negeri Raja Patih*, *Saniri Negeri Lengkap*, *Saniri Negeri Besar*. Saniri Negeri Raja Patih terdiri dari raja, kepala-kepala soa, kewang, dan marinyo. Saniri Negeri Raja Patih dianggap sebagai badan eksekutif. Saniri Negeri Lengkap, terdiri dari raja, kepala-kepala soa, meuweng, tuan tanah atau tua negeri (tua adat) dan kapitan. Saniri Negeri Lengkap tersebut dianggap sebagai badan legislatif, yang mempunyai tugas membangun dan memperlancar jalannya roda pemerintahan juga membuat peraturan-peraturan adat. Saniri Negeri Besar, yang merupakan badan tertinggi dan dapat diumpamakan sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat, keanggotaannya terdiri dari Saniri Negeri Raja Patih, Saniri Negeri Lengkap, ditambah dengan kepala Soa dan semua orang laki-laki warga desa yang sudah dewasa (lihat skema).

**Skema
Struktur Pemerintahan Negeri
Di Maluku Tengah atau Ambon**



Dari ketiga badan saniri negeri tersebut, Saniri Negeri Besar merupakan badan yang jarang berkumpul atau mengadakan rapat kecuali dalam pemilihan raja dan peristiwa-peristiwa lain yang menyangkut kepentingan seluruh warga desa itu. Dengan kata lain Badan Saniri Negeri Besar tersebut hanya bersidang setahun sekali. Namun demikian sewaktu-waktu dapat juga mengadakan sidang bila keadaan mendesak, seperti adanya sengketa tanah atau peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan kepentingan negeri itu sendiri. Persidangan yang dilaksanakan oleh Saniri Negeri Besar biasanya bersifat demokrasi yang diadakan di balai adat yang disebut *baiku* secara terbuka.

Berdasarkan struktur pemerintahan tersebut, raja berperan sebagai kepala pemerintahan dari suatu negeri. Sedangkan kepala pemerintahan dari suatu negeri. Sedangkan kepala soa berperan sebagai kepala kampung atau bagian dari negeri. Tokoh pemimpin lain seperti tuan tanah (tua adat), kapitan (malesi), marinyo, kewang, mauweng (maatoke), berperan sebagai pembantu raja.

Dengan peranannya sebagai kepala pemerintahan negeri, tugas raja adalah mengatur warganya dalam berbagai aspek kehidupan yang sesuai dengan adat yang berlaku. Agar para warga dapat menjalankan kehidupannya dengan sejahtera seorang raja harus mempunyai kemampuan dalam memimpin dan mengayomi. Namun demikian biasanya raja cukup mempunyai pengaruh, sehingga apa yang dianjurkan oleh raja seluruh warga akan melaksanakannya. Raja mempunyai cukup pengaruh dalam kehidupan warganya, biasanya karena raja itu tidak hanya dilihat sebagai kepala pemerintahan tetapi juga dilihat sebagai keturunan orang yang dihormati pada masa lalunya. Jadi kekuasaan raja didukung oleh mitos dan kharisma berdasarkan hak warisnya dari cikal bakal negeri.

Sebagai kepala pemerintahan suatu negeri, raja sering disebut atau disapa dengan Bapak Raja. Bapak Raja dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari cukup aktif, ia berusaha menangani berbagai masalah yang dialami oleh warganya sebatas kemampuan dan wewenang yang ia miliki. Di samping sebagai kepala pemerintahan negeri, Bapak Raja juga bertindak sebagai kepala adat (hukum adat) dalam negerinya tersebut. Sebagai kepala hukum adat, bapak raja bertugas pula dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan adat-istiadat negerinya. Dalam arti bapak raja sering sebagai pengambil keputusan dalam masalah adat, apabila tua adat tidak dapat menyelesaikannya.

Kepala soa yang merupakan kepala kampung kecil atau bagian dari negeri berfungsi maupun bertugas menjalankan atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan instruksi raja. Seperti mengatur kehidupan warga di kampung-kampung

di mana ia menjadi kepala soa. Merencanakan sesuatu untuk kepentingan negeri, membantu raja dalam memimpin negeri.

Kepala soa juga menjalankan atau melaksanakan pekerjaan sehari-hari raja, yang dilakukan secara bergilir atau bergantian di antara kepala-kepala soa setiap bulan. Kepala soa yang sedang menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai pengganti atau wakil raja tersebut, biasanya disebut kepala soa jaga atau kepala soa bulan. Dengan demikian dapat diartikan kepala soa memegang bidang administrasi dan tugas-tugas rutin pemerintahan negeri.

Seorang kepala kawang bertugas mengawasi dan menjaga batas-batas tanah, hasil hutan dan laut dari pertuanan negeri agar tidak diganggu oleh orang asing, mengawasi pembagian dan penggunaan "sasi" atau tanah hutan yang baru dibuka bagi keperluan perladangan agar tidak terjadi pemakaian yang tidak sesuai oleh anak negeri. Kepala kawang juga mengurus soal-soal perekonomian negeri, antara lain dari segala keuntungan hasil denda pelanggaran "sasi". Berkaitan dengan tugas tersebut, seorang kepala kawang harus dapat membaca, menulis, jujur, tegas, disiplin serta disenangi oleh anak negeri.

Tuan tanah atau tua adat disebut juga sebagai tua negeri. Sebagai pembantu raja ia bertugas dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat tanah atau pembagian tanah dan soal-soal warisan tanah. Tua adat dipilih menjalankan tugas demikian karena ia dianggap mampu dan menguasai berbagai masalah adat negerinya. Ia dianggap mampu dalam masalah tersebut, karena merupakan tokoh dari keturunan mata rumah pertama (tiap-tiap soa terdiri dari beberapa mata rumah) dan sebagai pemilik tanah di kampungnya. Berkaitan dengan itu seringkali seorang tua adat juga memangku jabatan sebagai kepala kawang. Sebagai tua adat atau tuan tanah atau tua negeri, ia hanya aktif pada saat ada masalah adat dalam negerinya.

Pendeta adat atau *mauweng* adalah pemimpin upacara adat dan agama (religi asli). Dalam melaksanakan perannya tersebut mauweng didampingi oleh seorang "maatoke". Seorang mau-

weng seringkali bertindak sebagai syaman karena dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu berhubungan dengan dunia gaib. Sebagai mauweng biasanya ia hanya akan aktif kalau ada upacara adat dan keagamaan saja.

Marinyo sebagai pembantu raja bertugas sebagai penyiar berita atau penyampai informasi dari raja dan kepala soa kepada penduduk negeri. Marinyo biasa melakukannya pada waktu sore hari dengan cara "*tabaus*" atau berteriak (mengumumkan dengan mulut). Untuk memanggil penduduk agar berkumpul mendengarkan informasi, marinyo memukul tifa sebagai isyarat. Berkaitan dengan fungsi dan tugasnya marinyo termasuk dalam bidang administrasi dan tugas-tugas rutin pemerintahan negeri.

Kapitan sebagai pembantu raja bertugas dalam masalah pertahanan dan keamanan. Kapitan dianggap sebagai panglima perang. Sebagai panglima seorang kapitan memimpin pertahanan negerinya dari serangan musuh. Dalam menjalankan tugasnya itu kapitan mempunyai seorang pembantu yang disebut "*malessy*". Masyarakat menganggap seorang kapitan memiliki kekuatan magis tertentu dan kebal terhadap segala macam senjata.

Kalau dijabarkan tugas-tugas kepala desa atau negeri beserta aparatnya itu sesuai dengan aturan yang berlaku, adalah sebagai berikut: Memimpin pemerintahan desa atau negeri dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Mengusahakan secara terus-menerus segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah yang lebih atas maupun pemerintah desa atau negeri sendiri ditaati oleh penduduk dan seluruh warga desa atau negeri. Menyelenggarakan koordinasi terhadap segala usaha dan kegiatan masyarakat, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan demi tercapainya daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat atau organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan. Membina ketentraman dan ketertiban dalam

desa atau negeri sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang P4, pembinaan politik dalam negeri, pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan pemerintah.

Di dalam struktur pemerintahan tersebut, raja yang disebut dengan Bapak Raja berada pada kedudukan paling tinggi atau tertinggi. Karena merupakan pucuk pimpinan dari suatu negeri. Sebagai pimpinan, raja tersebut termasuk dalam kategori pemimpin formal, karena secara resmi diangkat dalam jabatan kepemimpinan, teratur dalam suatu organisasi secara hirarki. Demikian pula dengan kepala soa juga termasuk dalam kategori pemimpin formal. Kedudukannya sebagai pemimpin, berada di bawah kedudukan raja. Kemudian kawang (latu kawang), kapitan, tua adat atau tuan tanah, meuweng maupun marinyo juga dapat dianggap sebagai pimpinan formal, karena mereka dalam struktur organisasi pemerintahan dan memimpin masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Kalau pada masa dahulu (Jaman Belanda) raja itu mempunyai tiga tingkatan, yaitu pertama Raja, kedua Pati, dan ketiga orang kaya. Ketiga tingkatan itu dalam sehari-hari biasa disebut juga dengan Bapak Raja. Bapak Raja itu berpangkat Raja, pati atau orang kaya dapat diketahui dari beslit pemerintah. Secara hirarki berarti raja sebagai pucuk pimpinan, di bawahnya pati lalu orang kaya. Kemudian baru kepala soa, dan aparat pemerintahan lainnya.

Mereka yang termasuk dalam kategori pemimpin informal antara lain guru, orang tua, pendeta agama Protestan, dan anggota majelis, orang yang memiliki kemampuan lebih. Seorang guru sering dianggap sebagai pemimpin, karena ia mempunyai peranan penting dalam masyarakat sebagai pendidik dalam bidang pengetahuan. Orang tua dianggap sebagai pemimpin, karena ia biasa memimpin dalam satu "mata rumah" (dalam keluarga luas) untuk menangani masalah yang ada dalam "mata rumah" itu. Sedangkan pendeta dan anggota majelis sebagai pemimpin berkaitan dengan peranan pentingnya dalam masyarakat sebagai orang yang mengetahui agama. Orang yang

mempunyai kelebihan biasanya dianggap sebagai pemimpin mempunyai peranan dalam kegiatan tertentu. Mereka ini termasuk dalam kategori pemimpin informal, karena tidak tersusun secara hirarki dalam suatu organisasi dan tugas-tugas yang mereka jalankan atau lakukan tidak terlalu mengikat sifatnya.

Dengan demikian kalau dilihat pola pelepasan sosial dalam masyarakatnya, Raja berada pada lapisan sosial paling tinggi atau lapisan atas. Kemudian para bangsawan atau keturunan raja merupakan lapisan kedua. Para kepala soa dan aparat pemerintahan lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat berada pada lapisan berikutnya. Lapisan terakhir diduduki oleh golongan biasa. Mereka yang berada pada lapisan lebih atas biasanya memperoleh penghormatan yang lebih tinggi dari masyarakatnya. Namun demikian dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang mencolok di antara mereka. Sehingga lapisan sosial yang ada tersebut hanya bersifat samar.

Dalam sistem pemerintahan di Maluku Tengah umumnya atau di Ambon khususnya, Raja yang menjadi atau merupakan pemimpin dari suatu negeri harus memiliki kriteria tertentu. Kriteria itu bisa bersifat tertulis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku atau telah ditetapkan, dan yang bersifat secara tersirat. Kriteria-kriteria yang sesuai dengan peraturan berlaku, antara lain setia pada Pancasila dan UUD 1945, tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan terlarang, sehat jasmani dan rohani, penduduk negeri yang bersangkutan. Sedangkan kriteria yang tersirat berupa kemampuan dan kepandaian, juga berdasarkan keturunan, pengalaman, mempunyai kharisma dan berwibawa, mempunyai kelebihan dari rakyatnya.

Raja sebagai pemimpin negeri dipilih berdasarkan keturunan. Belakangan atau akhir-akhir ini tidak begitu terdengar lagi. Namun demikian dalam kenyataannya seringkali Raja yang menjadi pemimpin negeri itu adalah karena keturunan.

Dengan demikian pada dasarnya prinsip keturunan tersebut masih berlaku, hanya tidak terlalu ditonjolkan lagi. Kalau pada masa lalu terutama pada waktu pemerintahan Jaman Belanda, seorang raja menjadi pemimpin suatu negeri adalah harus keturunan dari pemimpin sebelumnya. Karena keturunan itulah yang berhak secara adat memegang tampuk pimpinan. Dengan demikian kriteria-kriteria lainnya nampak tidak penting, seperti di Negeri Mahariti dari keturunan Watimena yang dapat menjadi raja, di Negeri Iha keturunan Amahora yang dapat menjadi raja.

Kepala soa yang menjadi pemimpin dari suatu soa atau perkampungan kecil, juga memiliki kriteria tertentu dalam menduduki jabatan itu. Kriteria yang dimiliki tidak berbeda dengan kriteria untuk seorang raja. Pada mulanya jabatan sebagai kepala soa langsung ditunjuk berdasarkan keturunan, dalam perkembangannya melalui pemilihan oleh dan di antara anak buah soanya, namun tetap melihat keturunannya. Sedangkan untuk Latu Kewang (Kepala Kewang), Kapitan, Tua Adat atau Tuan Tanah, Mauweng dan Marinyo juga biasa diperoleh berdasarkan keturunan di samping kemampuan dan kepandaian yang harus dimiliki.

Untuk menentukan seorang raja sebagai pemimpin suatu negeri tertentu di Maluku Tengah umumnya atau di Ambon khususnya, berlangsung cukup lama atau makan waktu bisa lebih dari sebulan atau berbulan-bulan dan biasanya juga tergantung dari kesigapan para pengurunya. Pertama-tama para pengurus tersebut melakukan suatu kegiatan mendatangi penduduk ke setiap "mata rumah" untuk mengadakan penilaian secara umum kira-kira siapa yang terbaik, dalam arti mempunyai kelebihan yang biasa dijadikan pemimpin dalam negerinya. Di sini para pengurus tersebut telah memberikan beberapa orang calon yang akan menjadi pemimpin negeri kepada penduduk. Beberapa calon yang akan menjadi pemimpin negeri itu, biasanya ditentukan oleh para pengurus dengan tidak mengabaikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Jadi beberapa orang calon pemimpin yang diajukan kepada penduduk

itu merupakan orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin negeri.

Pada waktu pengurus mendatangi penduduk ke setiap "mata rumah", penduduk disuruh memilih mana menurut mereka dari sekian calon-calon itu pantas menjadi pemimpin negerinya. Biasanya penduduk akan memilih calon pemimpinnya itu yang sesuai dengan keinginan mereka dan merupakan orang yang mereka jagokan masing-masing. Setelah diperoleh siapa yang dipilih oleh setiap penduduk untuk menjadi pemimpinnya, kemudian seluruhnya dikumpulkan. Setelah terkumpul dibahas untuk mengetahui atau menentukan secara kasar calon yang resmi, siapa yang memperoleh suara terbanyak ia yang akan menjadi pemimpin. Di sini telah dapat diketahui yang mendapat suara terbanyak. Biasanya yang memperoleh suara terbanyak itu lebih dari satu orang, jadi bisa dua atau tiga orang.

Oo, jadi raja dipilih melalui pemungutan suara sudah moderen dong, tradisionalnya mama, maksud anda barangkali Kepala Desa atau Lurah, jadi formal kan? Jadi menurut laporan ini sistem pemerintahan nasional tidak berlaku di tingkat paling bawah di Ambon.

Setelah diketahui siapa-siapa yang *memperoleh suara terbanyak* itu, lalu atas *instruksi camat* mereka (para pengurus) mengadakan pertemuan saniri besar atau rapat saniri besar. Pertemuan atau rapat ini diadakan bertujuan untuk menentukan siapa yang pantas jadi raja dari sekian yang terpilih itu, yang merupakan pilihan dari rakyat. Dengan dipimpin oleh Raja yang sedang menjabat atau pejabat sementara, calon resmi untuk menjadi pemimpin negeri yakni sebagai Raja kemudian ditentukan. Seorang yang terpilih menjadi calon pemimpin itu, biasanya pasti mempunyai nilai lebih dari lainnya dan merupakan orang yang disetujui oleh rakyat.

Selesai calon pemimpin negeri ditentukan, kemudian nama calon pemimpin itu diajukan kepada Bapak Camat. Di sini Bapak Camat memberikan persetujuannya sesuai dengan ke-

inginkan rakyat itu. Selanjutnya Bapak Camat akan meneruskan nama calon resmi pemimpin negeri itu kepada Bapak Bupati atau kepala daerah. Dari Bupati lah kemudian dikeluarkan suatu surat keputusan pengangkatan pemimpin negeri. Dengan adanya surat keputusan tersebut berarti Raja yang dimaksud telah syah menjadi pemimpin negerinya. Ia bukan sebagai calon pemimpin lagi, tetapi telah resmi menjadi pemimpin (Raja) dari suatu negeri yang akan ia pimpin.

Kemudian Raja yang telah diputuskan sebagai pemimpin negeri itu dilantik secara adat maupun secara sipil. Pelantikan secara adat biasanya dilakukan dengan mengadakan suatu upacara adat yang dihadiri oleh pemuka adat maupun pemuka agama, juga dari warga desa terutama yang laki-laki. Di dalam upacara pengangkatan atau pelantikan Raja ini selalu diakhiri dengan acara makan bersama secara adat. Sedangkan untuk pelantikan secara sipil dilakukan upacara biasa yang dihadiri oleh Bapak Camat dan beberapa stafnya, para aparat yang ada dalam struktur organisasi pemerintahan negeri (desa) beserta staf lainnya, juga para pemuka-pemuka desa atau negeri yang terkait.

Sedangkan dalam menentukan seorang menjadi kepala soa atau kepala kampung kecil di Maluku atau di Ambon khususnya ini, prosedurnya tidak terlalu lama seperti melakukan pemilihan seorang raja sebagai pemimpin negeri. Karena dalam pemilihan kepala soa tersebut, biasanya tidak selalu atau bahkan tidak tergantung sama sekali atau pilihan dari para (semua) warga atau rakyat dari kampung kecil yang bersangkutan. Jadi pemilihan kepala soa atau kepala suatu kampung kecil ini hanya tergantung dari para anak soa (keturunan dari keluarga tertentu yang memegang jabatan kepala soa). Anak soa di sini juga merupakan warga suatu lingkungan yang mempunyai hak dan kewajiban di dalam suatu soa. Biasanya tiap anak soa memiliki dusun (tanah kebun) atau tanah tempat tinggal di dalam negerinya. Para anak soa tersebut mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, dalam arti selain ia memilih ia juga dapat dipilih sebagai kepala soa.

Dalam proses pemilihan kepala soa tersebut, biasanya atas instruksi raja para anak soa disuruh berkumpul di suatu tempat atau di "boeleo" atau balairung (rumah adat). Di situ mereka bermusyawarah secara demokrasi, untuk menentukan yang mana dari beberapa calon pantas menjadi kepala soa. Seperti diketahui calon-calon tersebut adalah di antara anak-anak soa itu. Biasanya mereka yang dicalonkan itu dianggap mempunyai suatu kelebihan oleh yang lainnya. Kemudian di antara beberapa calon tersebut dipilih seorang yang mempunyai kelebihan dari calon lainnya. Caranya setiap anak soa mengajukan pilihan secara tertulis lalu dikumpulkan. Siapa yang memperoleh suara terbanyak ialah yang menjadi kepala soa.

Sebagai contoh konkrit dalam pemilihan kepala soa tersebut adalah demikian, misalnya Soa Mahu (Negeri Ihamahu) diinstruksikan Raja untuk menentukan kepala soanya. Di soa mahu mereka yang dapat menjadi kepala soa harus dari keturunan keluarga Silahooy, karena menurut adat dari keluarga inilah kepala-kepala soa sebelumnya menduduki jabatan. Sehingga hanya para anak soa dari keluarga inilah yang akan dapat dipilih dan memilih kepala soanya. Biasanya anak soa dari keluarga tersebut yang merupakan calon kepala soa ada beberapa orang. Namun demikian, secara demokrasi mereka akan menentukan atau memilih seorang sesuai dengan pandangan masing-masing yang mempunyai kelebihan dari lainnya. Setelah dipilih seorang lalu diajukan kepada Raja. Selanjutnya Raja akan mengajukan kepada camat, dan camat meneruskannya kepada Bupati dan Bupati mengeluarkan surat keputusannya.

Setelah SK (surat keputusan) ke luar atau turun, Raja lalu menentukan hari pelantikan atau pengangkatan kepala soa tersebut. Pelantikan atau pengangkatan kepala soa itu dilakukan oleh Raja, dihadiri oleh para stafnya dan seluruh rakyat dari kepala soa tersebut terutama anak soa dari kepala soa. Selesai itu barulah kepala soa tadi memerintah warganya dalam waktu yang tidak terbatas. Kecuali bila ia mening-

gal, atau melakukan pelanggaran atau kesalahan (bertentangan) dengan aturan pemerintah.

Untuk proses pemilihan pemimpin lainnya seperti Latu Kewang, Kapitan, Tuan Tanah (Tua Negeri), Mauweng dan Marinyo juga tidak berbelit-belit. Pemimpin-pemimpin ini harus selalu berasal dari keturunan keluarga tertentu. Misalkan di Negeri Ihamahu seorang yang akan menjadi kapitan dari keturunan keluarga Lisapari, karena dari keluarga inilah kapitan yang terdahulu bersal. Sedangkan untuk mauweng harus dari keturunan keluarga Hitipeuw, Tuan Tanah dari keturunan keluarga Sopakua terutama turunan Herman Sopakua. Marinyo dari keturunan keluarga Siahutahamata dan keluarga Kipeuw.

Karena ada beberapa calon dari keluarga-keluarga tersebut akan menjadi Kapitan. Latu Kewang, Mauweng, Marinyo, Tuan Tanah (Tua Negeri) maka dipilih seorang yang mempunyai kelebihan dari yang lain. Pemilihan tersebut langsung dilakukan oleh Raja. Setelah itu Raja mengajukan ke Camat dan diteruskan ke Bupati. Bupati lalu mengeluarkan surat keputusan. Pengangkatan atau pelantikan bagi pemimpin-pemimpin itu secara formal biasanya tidak ada. Hanya untuk Marinyo biasanya Raja langsung melantiknya.

Untuk pemimpin-pemimpin lainnya, seperti guru, pendeta agama, dalam arti pemimpin-pemimpin informal yang ada di Maluku Tengah umumnya atau Ambon khususnya tidak terjadi proses pemilihan seperti pemimpin-pemimpin yang disebutkan di atas. Karena mereka merupakan pemimpin yang tidak resmi, yang dianggap pemimpin hanya berdasarkan peranannya menonjol dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebagai pemimpin dapat diartikan mereka muncul dengan sendirinya karena berkaitan dengan peranannya dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Raja sebagai kepala (pemimpin) negeri, mempunyai hak dan kewajiban tertentu dari ia memimpin. Hak yang dimiliki, tentunya menerima pemberian (sumbangan) dari masya-

rakat dan sekaligus sebagai ucapan terima kasih dari masyarakat atas kepemimpinannya yang telah mengayomi kehidupan dalam masyarakat. Pemberian (sumbangan) dari masyarakat itu biasa berupa sandang atau pangan yang sifatnya temporer. Seperti kayu api ikan yang diperoleh rakyat ketika menangkap ikan, pakaian. Kemudian hasil-hasil tanaman rakyat berupa cengkeh, kelapa. Kadangkala Raja juga dapat menerima pemberian atau sumbangan dari rakyat berupa uang.

Hak lain yang dimiliki Raja, ia menerima pemberian atau sumbangan dari negeri berupa tanah dengan tanamannya. Tanah dengan tanaman itu disebut dusun. Misal tanah dengan tanaman sagu. Karena diberi untuk Raja disebut dengan "dusun sagu Raja". Bila tanah itu bertanam kelapa, disebut "dusun kelapa Raja". Atau tanah ini bertanam cengkeh, disebut "dusun cengkeh Raja". Pemberian tanah itu hanya berlangsung selama raja memegang jabatannya. Kalau tidak memegang jabatan Raja lagi, tanah itu menjadi "dusun inventaris" atau diberikan atau menjadi milik raja berikutnya atau raja yang baru.

Selain itu Raja juga mendapat atau disediakan suatu wilayah pelabuhan negeri atau wilayah laut negeri. Di sini semua hasil laut di atas wilayah pelabuhan atau laut negeri itu khusus untuk Raja. Dalam wilayah laut untuk Raja ini, rakyat biasa membuat sero atau alat penangkap ikan untuk keperluan Raja. Biasanya wilayah laut untuk raja itu atau disebut "tanah sero" dilelang kepada rakyat untuk dikontrakan dalam jangka waktu satu tahun. Apabila ada rakyat yang mau mengontrak "tanah sero" tersebut, biaya dari pengontrak diberikan kepada Raja. Pemberian atau sumbangan yang menjadi hak raja tersebut tidak boleh diganggu gugat atau dilanggar berdasarkan hukum adat. Lagi pula rakyat telah mengetahui semua yang menjadi milik Raja, sehingga mereka tidak akan melanggar atau mengganggunya.

Pemberian yang diterima Raja tersebut merupakan suatu bukti bahwa ia adalah orang yang menjadi tulang punggung

negeri. Sehingga segala kebutuhan raja menjadi perhatian negeri. Dengan demikian Raja dapat berkonsentrasi pada tugasnya saja. Sumbangan yang diterima Raja tersebut digunakan bagi biaya kehidupannya beserta keluarga. Di samping itu kehidupan Raja beserta keluarga juga diperoleh dari hasil tanah atau kebun miliknya sendiri dan dari pensiunan di mana ia bekerja sebelumnya.

Sedangkan untuk kewajiban Raja dalam memimpin, adalah mengayomi seluruh warga masyarakat, melindungi sarana dan prasarana yang ada dalam wilayah desa seperti jalan-jalan, jembatan-jembatan, bangunan-bangunan, lapangan-lapangan, pasar, saluran air dan tempat-tempat lainnya yang menjadi milik negeri. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin, seorang pemimpin negeri tersebut mempunyai beberapa jalur. Jalur yang dimaksud, yaitu jalur ke atas, jalur ke luar, jalur ke samping, jalur ke bawah, jalur ke dalam.

Jalur ke atas, merupakan jalur pemerintah dan laporan dari dan ke kecamatan. Jalur ke luar, yaitu jalur konsultasi dan kerja sama dengan desa-desa (negeri-negeri) yang ada di sekitarnya. Jalur ke bawah, adalah jalur pelayanan terhadap seluruh warga masyarakat desa (negeri). Jalur ke dalam merupakan jalur perintah dan laporan kepada dan dari unsur-unsur staf dan pelaksana (intern organisasi).

Raja sebagai pemimpin negeri mempunyai simbol atau atribut tertentu. Simbol atau atribut tersebut terdiri dari pakaian yang bermodel safari, berwarna putih-putih dengan memakai lencana pada dada sebelah kiri di pakaian atau baju tersebut. Atribut atau simbol yang dipakai oleh pemimpin formal kepala desa atau negeri tersebut, rupanya telah diatur secara seragam oleh pemerintah lebih atas dan ini hampir berlaku umum di setiap desa lainnya. Pada masa lalu atribut atau simbol bagi pemimpin formal kepala desa (negeri) ini tidak selalu sama atau seragam. Simbol atau atribut yang nampak biasa berupa pakaian, rumah atau lainnya yang membedakan pemimpin itu dengan rakyat biasa. Namun secara adat atribut

atau simbol demikian masih ada, disebut dengan atribut atau simbol adat dan biasa dipakai oleh raja pada waktu upacara adat seperti di Negeri Ihamahu atribut atau simbol yang diberikan kepada Raja berupa selempang atau selendang, topi dan tongkat Raja.

B. SISTEM KEPEMIMPINAN

Berlangsungnya kepemimpinan dalam suatu masyarakat biasanya akan terwujud atau dapat nampak dalam berbagai bidang. Bidang-bidang yang nampak selalu memunculkan suatu pimpinan tersebut, antara lain adalah dalam bidang keagamaan dan yang berkaitan dengan upacara adat, hukum, kegiatan sosial, ekonomi, pimpinan yang muncul atau yang peranannya nampak dalam berbagai bidang tersebut, bisa pemimpin atau pimpinan yang bersifat formal maupun informal.

Dalam bidang keagamaan, biasanya pemimpin yang nampak muncul adalah pendeta agama dan anggota majelis. Misalkan dalam suatu kegiatan pengukuhan seorang raja menjadi pemimpin negeri. Pendeta agama dalam hal ini memimpin kegiatan tersebut di gereja. Dengan diikuti oleh para anggota majelis, pendeta agama mulai menjalankan pengukuhan seorang Raja.

Pada acara pengukuhan itu Raja bersumpah di hadapan Tuhan yang dibimbing atau dipimpin oleh pendeta, yang dilakukan di depan Altar. Antara pendeta dengan Raja saling berhadapan dan para anggota majelis berada di belakang pendeta tadi, sedangkan para hadirin berada agak jauh di belakang Raja. Selesai bersumpah, Raja diberi salam (ucapan selamat) oleh pendeta diikuti oleh anggota majelis. Kemudian baru para hadirin yang antara lain terdiri dari pejabat-pejabat negeri, tokoh masyarakat, dan sebagian rakyat negeri tersebut turut serta memberi ucapan selamat. Selesai acara pengukuhan Raja yang dipimpin oleh pendeta tersebut, dilanjutkan dengan acara makan bersama. Biasanya jenis makanan yang disajikan berupa "nasi pulu bulu", yaitu sayur-sayuran, daging, ubi,

keladi, kembili, dan nasi yang khusus dimasak dalam bambu.

Dalam suatu kegiatan upacara adat seorang pemimpin sering atau selalu pula nampak muncul menjalankan perannya. Misalkan dalam upacara adat yang bernama upacara "kora-kora" atau perahu tidak bercadik di Negeri Ulath. Maksud dari upacara tersebut adalah untuk mengingatkan pelayaran para leluhur rakyat negeri Ulath dengan Iha dan Tuhaha.

Dalam pelaksanaan upacara tersebut, nampak beberapa pemimpin yang menjalankan perannya atau memegang peranan, seperti Raja, pendeta dan anggota majelisnya, serta kepala kewang atau latu kewang, juga marinyo. Upacara ini dimulai dengan pelepasan para kewang untuk membuat perahu tidak bercadik di hutan. Di sini Raja sebagai kepala adat melakukan pelepasan tersebut dengan memberikan patuah-petuah. Setelah itu para kewang berangkat menuju hutan yang telah ditentukan dipimpin latu kewang (kepala kewang). Kepala kewang sebelum berangkat telah membagi tugas untuk masing-masing anggota dan mencek kembali pembagian tugas yang telah ditetapkan itu.

Setiba di hutan Kepala Kewang memimpin pendirian rumah yang akan mereka tempati selama beberapa hari dalam rangka membuat perahu atau kora-kora tersebut. Selain itu kepala kewang atau bisa juga anggota kewang memimpin acara ibadah untuk memulai kegiatan membuat kora-kora itu. Maksudnya agar kegiatan yang mereka lakukan tersebut diperkenankan dan diberkati oleh Tuhan. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan kora-kora tersebut, selalu sesuai dengan hari yang telah ditetapkan oleh adat atau adatlah yang telah menetapkan jadwal kegiatan untuk setiap harinya. Sehingga setiap tahun hari-hari dalam pembuatan kora-kora tersebut selalu tetap atau sama, tidak pernah berubah atau berbeda.

Setelah beberapa hari melakukan kegiatan membuat kora-kora atau menjelang 3 dan 4 hari lagi selesainya pembuatan kora-kora Kepala Kewang menyampaikan atau memberitahukan secara tertulis kepada Raja dan juga Badan Saniri Negeri.

Dengan demikian Raja dan badan saniri negeri dapat bersiap-siap untuk memimpin puncak (akhir) dari upacara kora-kora tersebut. Pemberitahuan dari Kepala Kewang akan selesainya kora-kora itu, menjadi tanggung jawab Marinyo untuk mengumumkannya di hadapan rakyat. Marinyo dalam hal ini dengan cara "tabaos" atau berteriak memanggil penduduk untuk berkumpul di tanah lapang. Kemudian di depan para warga Marinyo menyampaikan pengumuman tersebut. Pada waktu ia menyampaikan pengumuman para warga mendengarkan dengan hening. Pada saat itu seorang Marinyo terlihat sebagai orang penting yang mempunyai peranan memimpin warganya. Berkaitan dengan pengumuman tersebut warga disuruh mempersiapkan bahan makanan dan mengolahnya untuk disajikan pada puncak upacara kora-kora tersebut.

Puncak upacara kora-kora diselenggarakan di "baileo" (balairung) pada pukul 24.00, yang dihadiri oleh semua anggota Kewang, Saniri Negeri, Kapitan, Tua-tua Adat, pendeta dan majelisnya, para warga negeri. Raja sebagai kepala adat atau pemimpin adat memberikan kata sambutan pada acara pembukaan. Kemudian dilanjutkan kata sambutan dari kepala kewang yang memimpin acara penutup dengan doa pengucapan syukur yang dipimpin pendeta dan dibantu dewan majelis.

Di dalam bidang hukum peranan kepemimpinan seseorang biasanya akan nampak atau muncul dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan terjadinya suatu pelanggaran di masyarakat. Di Maluku Tengah pada umumnya dan di Ambon khususnya pelanggaran yang biasa nampak antara lain dalam perkawinan antara "pela keras", dalam "sasi". Pelanggaran perkawinan antara "Pela Keras" maksudnya dilarang kawin antara sesama "pela keras". Pela itu merupakan salah satu organisasi sosial desa yang mempunyai ikatan-ikatan persatuan persahabatan antar warga-warga dari dua desa atau lebih yang berdasarkan ikatan adat. Pela itu ada dua jenis, yaitu pela keras atau pela batu karang dan pela tempat sirih. Pela keras inilah yang mempunyai larangan kawin antara sesamanya.

Bila diketahui terjadi pelanggaran larang kawin dalam pela keras itu, berarti yang bersangkutan melakukan penyimpangan "adat kawin pela". Dengan dipimpin kepala mungare (kepala pemuda) yang bersangkutan dibawa ke hadapan Raja di rumahnya. Pada saat itu yang bersangkutan tersebut dihina, dicaci, diejek, bahkan dipukul oleh setiap orang di hadapan pemuka negeri (Raja) dan aparat lembaga adat. Kemudian selanjutnya Raja dan aparatnya menuju "baileu" (rumah adat) untuk mengadili atau memberi hukuman adat terhadap yang bersangkutan atau pelanggaran tadi.

Dengan dipimpin Raja sebagai kepala hukum adat, pelanggaran tadi diperintah untuk berdiri di batu adat atau "batu pamali" untuk disumpah atau di "balele". Kemudian pelanggaran itu diarak sepanjang negeri oleh perangkat adat dengan diiringi musik adat, yaitu tifa dan totobuang. Sepanjang jalan pelanggaran tadi harus berteriak "Jangan seperti saya (yang menyebut nama lengkap) kawin dengan pela". Hukuman ini berlangsung selama sehari. Selesai hukuman tersebut pelanggaran tadi dikucilkan oleh warga desa, dan tidak diperkenankan tinggal atau kembali di desa itu lagi.

Berkaitan dengan hukuman terhadap pelanggaran dalam kawin pela tersebut, para penduduk negeri pada dasarnya beranggapan bahwa pelanggaran itu meskipun telah ke luar dari negeri atau desanya tetap hukuman adat melekat dalam dirinya. Seperti rumah tangganya tidak akan bahagia, sering terjadi perpecahan antara suami isteri, anak-anak sering terkena penyakit atau musibah akan datang terus menerus melanda keluarga tersebut, sampai mendatangkan suatu kematian berturut-turut. Sehingga akhirnya "mata rumah" dari keluarga tersebut menjadi hilang (punah). Bila terjadi pelanggaran mengalami kejadian demikian, maka ia dinamakan mengalami "hukuman mata rumah".

Pelanggaran dalam "sasi", maksudnya melakukan pelanggaran terhadap perlindungan pelestarian lingkungan hidup. Jadi "sasi" di sini merupakan suatu perlindungan akan ling-

sebagai pemimpin. Karena ia langsung turun dalam kegiatan tersebut. Namun demikian Raja dan kepala soa juga nampak peranannya sebagai pemimpin pada saat-saat tertentu dalam kegiatan tersebut. Misalkan mengamankan lingkungan dari perselisihan-perselisihan di negeri. Apabila kepala mungare tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka dalam situasi dan kondisi demikianlah kepala soa dan Raja akan muncul untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Selain mengamankan lingkungan dari perselisihan-perselisihan di negeri, kepala mungare juga mengamankan lingkungan dari segala pencurian. Untuk itu di bawah pimpinannya diadakan ronda malam, yang anggotanya terdiri dari anak muda atau lelaki dewasa. Agar berlangsungnya kegiatan tersebut dibangun pos-pos jaga yang letaknya di ujung negeri atau desa. Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang berbahaya waktu tengah malam, kepala mungare diikuti anak buahnya akan memukul kentongan untuk membangunkan warga negeri.

Kalau pada masa lalu pemeliharaan keamanan lingkungan ini ditangani oleh kapitan atau panglima perang. Ia dianggap mempunyai kekuatan sakti, seperti memiliki ilmu kebal dan lain sebagainya. Karena keberanian dan kesaktiannya itu kapitan disegani oleh masyarakat. Bila terjadi penyerangan atau perselisihan antar negeri, kapitanlah yang harus mempertahankan negeri bersama-sama dengan kepala pemuda dan anggota-anggotanya. Pada masa kini peranan kapitan sebagai pemimpin dalam masalah tersebut tidak nampak lagi. Namun demikian peranannya akan tetap nampak dalam kegiatan-kegiatan adat mendampingi Raja. Di sini kapitan lengkap dengan pakaian perangnya siap menjaga keselamatan Raja dan keamanan negerinya.

Untuk kegiatan pemeliharaan dan persatuan masyarakat, rupanya pemimpin yang nampak menanganinya cukup banyak. Seperti Raja, kepala soa, kepala kawang, kepala mungare, dan juga marinyo. Kegiatan pemeliharaan kesatuan dan persatuan masyarakat ini, biasanya terwujud dalam bentuk kegiatan-

an yang sifatnya rekreasi. Seperti dalam kegiatan "arombai manggurabe" atau perlombaan perahu dan kegiatan "hela rotan" atau perlombaan tarik tambang. Pada waktu pelaksanaan acara perlombaan perahu, kepala mungare mengatur setiap perahu harus terdiri dari 15 sampai 20 orang. Ia harus mengetahui siapa di dalam perahu yang pemukul tifa, pendayung dan pemegang kemudi. Di sini perlu suatu kekompakkan antara pendayung, pemukul tifa, dan pemegang kemudi tadi.

Para pendayung akan mengikuti irama tifa dari temannya pemukul tifa. Mereka telah mengerti ritme-ritme tertentu dari suara tifa tadi. Ada saat-saat di mana dayung harus diputar, diangkat dan lain sebagainya. Semuanya diatur oleh pemukul tifa tadi. Bagi pemegang kemudi ia harus mengetahui arus air. Sehingga pada saat ia membelok, memotong ombak dan lainnya tidak terganggu atau memperlambat kecepatan perahu yang didayung. Dengan demikian harus ada kekompakkan kerja, rasa persatuan dan kesatuan bersama untuk mencapai kemenangan. Pada saat perlombaan berlangsung kepala kewang dan para kewang selalu mengawasi agar tidak ada yang berbuat curang. Perlombaan ini dapat diselenggarakan antar warga negeri atau dengan negeri lain. Siapa yang menang dalam perlombaan tersebut kemudian diinformasikan marinyo. Lalu Raja yang didampingi kepala soa akan memberikan hadiah kemenangan.

Dalam kegiatan perlombaan (permainan) tarik tambang. Sama halnya dengan perlombaan perahu, kepala mungarelah yang mengaturnya. Jumlah peserta antara 20 – 40 dalam masing-masing kelompok pada saat pelaksanaannya. Dengan diiringi tifa dan nyanyian yang gembira, rotan (tambang) dipegang oleh masing-masing kelompok pada bagian ujung dan diarak sepanjang jalan utama. Ketika bunyi tifa dipukul dengan cepat maka kedua kelompok saling berusaha untuk menarik ujung bambu milik lawannya. Sehingga terjadi saling tarik-menarik untuk beberapa saat, yang akhirnya salah satu kelompok akan kalah dan menyerahkan bagian tambangnya kepada lawan yang lebih kuat.

kungan hidup, dalam arti melindungi hasil-hasil hutan, laut, kampung, dusun, dan kebun-kebun atau segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dalam periode tertentu. Sesuatu yang mendapat sasi itu, biasanya diberi tanda daun kelapa muda atau lainnya dengan mengucapkan kata-kata tertentu. Misalkan sasi pada pohon sagu tandanya daun kelapa dililitkan pada pohon itu. Dengan demikian berarti pohon tersebut telah mendapat sasi. Sasi tersebut ada 2 macam, yaitu sasi negeri atau adat dan sasi gereja.

Adanya dua macam sasi, berarti pelanggaran yang terjadi bisa pada sasi gereja atau sasi negeri. Bila pelanggaran dalam sasi gereja, pemimpin yang berperan dalam menyelesaikannya ialah seorang pendeta. Misalkan sasi gereja terhadap tumbuhan pohon kelapa. Berarti pohon kelapa itu mendapat perlindungan dari gereja. Kemudian terjadi pelanggaran, di mana ada seseorang yang mengambil kelapa dari pohon tersebut. Si pelanggar itu diharuskan mengadu kepada pendeta agar diselesaikan hukumannya. Pendeta memberikan hukuman dalam bentuk nasihat atau petuah-petuah. Sesudah itu pendeta memberikan doa pada pelanggar tadi, agar ia tidak mendapat bahaya atau semacam kutukan dari Tuhan. Karena biasanya mereka yang melanggar sasi gereja tersebut, selalu mengalami musibah. Sehingga penyelesaiannya ia perlu didoakan pendeta. Jadi pendeta dalam hal ini nampak memberi suatu perasaan aman dan tentram terhadap pelaku pelanggar sasi tadi.

Kalau pelanggaran dalam sasi negeri atau adat, pemimpin yang berperan dalam menyelesaikannya ialah kepala kawang atau anak kawang. Seperti sasi negeri terhadap suatu labuhan (berupa teluk kecil, muara sungai yang mengandung banyak ikan). Bila ada yang melanggar mengambil ikan sembarangan di situ, ia akan dikenakan hukuman oleh kepala kawang maupun anak kawang. Biasanya kepala kawang memberi hukuman terhadap pelanggar berbentuk denda yang harus dibayar sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kepala kawang saat itu menjadi pemimpin yang disegani. Karena sebagai orang yang bertanggung jawab dalam masalah itu.

Dalam bidang kegiatan sosial, pemimpin yang nampak peranannya muncul, antara lain dalam kegiatan membersihkan lingkungan, pemeliharaan keamanan lingkungan, pemeliharaan kesatuan dan persatuan masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan ternirnya. Sehingga dengan peranan pemimpin itu kegiatan yang mereka lakukan dapat berlangsung.

Di dalam kegiatan membersihkan lingkungan, pemimpin yang menampakkan peranannya yakni Kepala Pemuda atau Kepala Mungare. Selain itu juga Raja, kepala soa, kepala kewang dan marinyo. Kegiatan membersihkan lingkungan itu diadakan setiap tiga bulan sekali. Disebut dengan kegiatan "kerja bakti atau bakti massal". Dalam kerja bakti itu ada kegiatan menyapu atau membersihkan jalan, memperbaiki jalan dan pagar jalan, membersihkan lokasi di sekitar pohon-pohon, membuat kandang untuk binatang-binatang ternak. Semua kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari kepala mungare. Di sini kepala mungare bekerja sama dengan Raja dan kepala soa mengatur dan menentukan pekerjaan yang akan dilakukan itu.

Pekerjaan menyapu atau membersihkan jalan diatur pelaksanaannya dalam satu minggu dua kali. Untuk memperbaiki jalan dan pagar jalan, diatur pelaksanaannya pada hari pertama di awal bulan. Sedangkan untuk membuat kandang binatang-binatang ternak dan membersihkan lokasi sekitar pohon-pohon, pelaksanaannya pada hari-hari kosong di luar pelaksanaan membersihkan jalan dan memperbaiki jalan maupun pagar jalan. Memulai pelaksanaan kegiatan tersebut, biasanya marinyo yang memberi informasi kepada masyarakat kepada anak-anak muda agar mereka bersiap-siap untuk "kerja bakti". Pada saat pelaksanaan "kerja bakti" itu, kepala mungare selalu ada di sekitar para pekerja untuk memimpin pekerjaan yang mereka lakukan. Sementara itu kepala kewang selalu mengawasi (memeriksa) para pekerja agar tetap menjalankan kegiatannya.

Di dalam kegiatan pemeliharaan keamanan lingkungan, juga kepala mungare yang lebih menampakkan peranannya

Permainan hela rotan atau tarik tambang ini mempunyai atau mengandung unsur kesatuan dan persatuan, karena setiap kelompok berusaha saling bantu-membantu atau kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menang dalam pertandingan. Bahkan seringkali terjadi simpatisan dari masing-masing kelompok turun ke arena pertandingan untuk membantu memperebutkan kemenangannya. Kalau terjadi demikian marinyo akan memperingati mereka, bila tidak diindahkan kepala kawang maupun para kawang turun tangan langsung menarik simpatisan tersebut ke luar dari arena pertandingan. Setelah diketahui siapa yang menang, marinyo menginformasikannya. Kemudian Raja diikuti kepala soa akan memberikan penghargaan kemenangan.

Di dalam bidang ekonomi, pimpinan atau pemimpin yang peranannya jelas nampak biasanya dalam kegiatan mata pencaharian hidup seperti di dalam kegiatan pertanian dan penangkapan ikan. Dalam kedua kegiatan mata pencaharian hidup tersebut, pemimpin yang seringkali muncul adalah kepala kawang maupun anak kawang. Di sini kepala kawang maupun anak kawang bertindak sebagai pengawas terhadap pertanian atau penangkapan ikan tersebut. Dalam melakukan pengawasan tersebut, kepala kawang maupun anak kawang berkeliling melihat keadaan di wilayah pertanian dan wilayah penangkapan ikan negerinya untuk mengetahui peraturan yang dikenakan dapat berjalan.

Sebenarnya pengawasan yang dilakukan kepala kawang dan anak kawang ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan sasi. Karena sasi tersebut seringkali atau selalu berkaitan dengan masalah perekonomian, dan kepala kawang maupun anak kawang adalah yang bertanggung jawab pada masalah perekonomian negeri berdasarkan dari struktur pemerintahannya. Terutama dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah perekonomian.

BAB IV
NILAI-NILAI BUDAYA
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
TRADISIONAL MASYARAKAT AMBON

Menurut Koentjaraningrat (tahun 1983) wujud kebudayaan terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu sistem ide, sistem sosial dan sistem teknologi atau kebudayaan materi. Ketiga wujud tersebut terangkum dalam setiap kebudayaan manusia. Setiap wujud pedoman dan akan mempengaruhi wujud yang lainnya. Sistem pemerintahan yang merupakan salah satu bentuk-bentuk sistem sosial pembentukannya dan pelaksanaannya sangat diwarnai oleh sistem nilai yang ada dan berkembang pada masyarakat yang bersangkutan. Demikianpula halnya yang terdapat dan terjadi pada sistem pemerintahan tradisional masyarakat Ambon di Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku.

Latar belakang sejarah Ambon yang panjang dan sarat dengan pengaruh kebudayaan asing sudah tentu merupakan masalah tersendiri dalam mengidentifikasi nilai-nilai budaya asli dalam sistem pemerintahannya. Masyarakat Ambon dalam perkembangannya paling tidak telah dipengaruhi oleh tiga kebudayaan besar yang masing-masing telah memberi sistem pemerintahannya. Tiga kebudayaan besar ini adalah Hindu Islam, dan Barat Portugis, dan Belanda). Di samping itu sebagai

konsekuensi logis dari keberadaan Ambon dalam tatanan sistem pemerintahan Indonesia, sistem pemerintahan tradisional di daerah ini sudah tentu juga mengalami perubahan dan penyesuaian.

Pengaruh Islam dialami oleh masyarakat Ambon sejak masuknya wilayah ini ke dalam kekuasaan Kerajaan Ampat Perdana pada sekitar abad ke XIV. Kekuasaan kerajaan ini yang merupakan kerajaan Islam pertama di daerah Maluku meliputi hampir sebagian besar Propinsi Maluku pada saat ini ditambah dengan sebagian dari daerah kepala burung di Irian Jaya. Pengaruh Portugis diterima masyarakat Ambon sehubungan dengan usahanya berdagang rempah-rempah dengan masyarakat di daerah ini. Selain usaha dagangnya bangsa Portugis juga memperkenalkan dan menyebarkan agama Kristen. Persaingan dagang antara Portugis dan Belanda yang selanjutnya dimenangkan oleh pihak Belanda membawa babak baru dalam tatanan masyarakat Ambon. Setiap kekuatan yang masuk ke Ambon selain membawa berbagai pengaruh dalam tata kehidupan juga mentrapkan sistem pemerintahannya sesuai dengan kebudayaannya dan tujuan dari segenap misi yang dilakukannya.

Sistem pemerintahan pada suatu kelompok masyarakat pada dasarnya dilandasi oleh adanya suatu upaya atau kehendak untuk mengatur masyarakat sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang bersangkutan. Karena itulah sebuah sistem pemerintahan senantiasa berdasarkan pada berbagai perangkat undang-undang dan peraturan baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai pedoman pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya suatu sistem pemerintahan paling tidak melibatkan orang-orang yang memerintah dan orang-orang yang diperintah. Berbagai peraturan dan tata cara jalannya pemerintahan yang kesemuanya itu merupakan unsur-unsur dalam sistem pemerintahan mengacu pada sistem nilai dari masyarakat yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu sejumlah nilai budaya penting yang terdapat dalam sistem pemerintahan tradisional pada masyarakat Ambon meliputi nilai-

nilai budaya perlindungan, kesejahteraan, demokrasi, ketuhanan, dan pengawasan. Berikut ini akan dibahas setiap nilai yang ada tersebut. Tata urutan penguraian tidaklah menggambarkan prioritas kepentingan dalam sistem pemerintahan tersebut. Antara satu nilai dengan nilai yang lain dalam pelaksanaannya terangkum menjadi satu dan merupakan suatu totalitas nilai yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

A. NILAI PERLINDUNGAN

Yang dimaksud dengan perlindungan adalah suatu usaha atau upaya seseorang atau kelompok masyarakat untuk memberikan atau menggunakan terwujudnya rasa aman, tenang, dan nyaman kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ketiga perasaan tersebut merupakan salah satu wujud kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Dalam diri seseorang rasa aman, tenang, dan nyaman biasanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adanya rasa aman dari serangan kelompok masyarakat lain misalnya akan menyebabkan masyarakat menjadi tenang dan selanjutnya akan menimbulkan rasa nyaman hidup dalam wilayah yang bersangkutan. Ketiga perasaan tersebut terjadi pada hampir semua segi-segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat seperti dalam kehidupan ekonomi, adat, agama, dan sosial kemasyarakatan.

Rasa aman, tenang, dan nyaman pada masyarakat akan terwujud bila ada perlindungan dari satu unsur kekuatan-kekuatan tertentu. Struktur pemerintahan tradisional Ambon yang biasa juga disebut dengan pemerintahan Negeri tersendiri atas berbagai unsur jabatan yang masing-masingnya mempunyai tugas dan kewajiban sendiri-sendiri dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. "Kewang" misalnya mempunyai tugas untuk menjaga batas-batas tanah milik dari warga masyarakat. Persengketaan hak atas tanah dapat menimbulkan konflik di antara warga masyarakat. Dengan perlindungan hak atas tanah dari "kewang" seorang petani akan

merasa lebih aman dan tenang dalam menyelenggarakan pekerjaannya. Masyarakat tradisional Ambon umumnya bermata-pencaharian sebagai petani dan nelayan.

Selain bertugas dalam hal pertanahan yang merupakan sarana hidup masyarakat petani, "kewang" juga bertugas menjaga batas-batas laut daerah tangkapan ikan masyarakatnya dari serobotan nelayan kelompok masyarakat lain. Masyarakat tradisional Ambon secara tidak tertulis memiliki batas-batas laut daerah tangkapan ikan masing-masing. Batas-batas yang digunakan sebagai pedoman umumnya adalah jarak pandang dan gejala-gejala alam seperti gelombang dari arus laut. Misalnya daerah tangkapan ikan desa A batasnya adalah mulai terlihatnya deburan ombak di satu daerah tertentu. Terjadinya penyerobotan oleh nelayan dari daerah lain akan dianggap sebagai penyerangan produksi di daerah tangkapan-nya yang kemudian akan menambah pendapatannya. Karena itu sesuai dengan tugas-tugasnya kebijaksanaan dan keberanian seorang "kewang" sangatlah diharapkan oleh masyarakatnya. Dengan otoritasnya masyarakat mengharapkan perlindungan atas hak-haknya dalam aktivitas ekonominya.

Adat dan agama merupakan kebutuhan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan seseorang kebutuhan spiritual sama pentingnya dengan kebutuhan material, yaitu hal-hal yang bersifat kebendaan. Karena itu kesinambungan penyelenggaraannya penting untuk diperhatikan. Dalam sistem pemerintahan tradisional Ambon pejabat yang ditugaskan untuk menyelenggarakan berbagai upacara adat dan keagamaan adalah "meuwang". Petugas ini bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai upacara adat dan keagamaan yang diperlukan oleh masyarakat. Dialah yang menjadi pimpinan dalam acara-acara itu. Seorang meuwang menguasai berbagai tata cara upacara adat dan peribadatan acara keagamaan. Melalui pemahaman dan pengetahuan tentang berbagai upacara yang dimiliki oleh meuwang. Pengetahuan tersebut dapat dilestarikan dan diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Sehingga keberlangsungan berbagai upacara adat

dan keagamaan yang sangat diperlukan bagi pedoman hidup manusia dapat dilindungi. Bagi masyarakat kehadiran seorang meuwang dalam suatu upacara adat atau keagamaan memberikan satu kesejukan hati tersendiri.

Nilai perlindungan dalam sistem pemerintahan tradisional Ambon selain terlihat dari tugas dan tanggungjawab dari setiap struktur yang ada dalam sistem pemerintahan tersebut, juga terlihat dari sapaan yang dilontarkan masyarakatnya terhadap para pejabatnya. "Raja" misalnya sebagai pejabat tertinggi dan mengepalai suatu kelompok masyarakat disapa dengan "Bapak Raja". Istilah Bapak mempunyai makna yang sangat luas. Dalam sebuah keluarga Bapak adalah kepala rumah tangga yang tugas utamanya adalah melindungi dan mengayomi semua anggota rumah tangga, selain itu juga memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat material maupun spiritual. Sehubungan dengan Bapak dalam sebuah rumah tangga demikian pulalah yang diharapkan warga masyarakat terhadap pimpinannya, yaitu Raja. Untuk memenuhi hal itu diharapkan seorang Raja sebagai kepala pemerintahan yang memiliki ketegasan dalam memerintah dan senantiasa berlaku adil dan bijaksana. Seorang Raja hendaknya memiliki kewibawaan yang cukup tinggi sehingga melalui kewibawaannya itu warga masyarakat yang dipimpinnya merasa terayomi. Keberanian seorang Raja di tengah-tengah warga masyarakatnya akan dapat memberikan rasa aman, tenang, dan nyaman.

B. NILAI KESEJAHTERAAN

Erat kaitannya dengan nilai perlindungan dalam sistem pemerintahan tradisional Ambon yang juga disebut sebagai Pemerintahan Negeri memiliki nilai kesejahteraan di dalam pelayanannya kepada masyarakat. Perlindungan merupakan satu tahapan situasi untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertentu. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu tingkat kecukupan kebutuhan hidup baik yang bersifat material maupun spiritual. Agar kehidupan seseorang menjadi sejahtera diperlukan keseimbangan antara kedua kebutuhan tersebut.

Peranan sistem pemerintahan tradisional masyarakat Ambon dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya antara lain terlihat dari beberapa jabatan dalam struktur pemerintahan tersebut. Sehubungan dengan jenis mata pencaharian utama masyarakat, maka kedua jenis kegiatan ini mendapatkan perhatian khusus seperti telah disebutkan di atas pejabat yang menangani masalah ini adalah "Kewang". Dalam fungsinya pejabat ini bertanggungjawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan pertanian dan kenelayanan.

Berbagai peraturan diterapkan agar masyarakat dapat bekerja dalam bidangnya dengan tenang. Ketenangan dalam bekerja akan memberikan hasil yang baik. Sudah barang tentu hasil yang baik akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi para pekerja. Berkaitan dengan nilai kesejahteraan yang dikandung dalam sistem pemerintahan masyarakat di daerah ini, mengharuskan seorang Kewang fahan dan pintar dalam seluk beluk pertanian dan kenelayanan. Dengan pengetahuan dan keterampilannya seorang Kewang dapat memberi penjelasan kepada masyarakatnya tentang kegiatan bertani atau kenelayanan. Sudah barang tentu tujuan utama dari persyaratan tersebut adalah agar masyarakat dapat memperoleh hasil yang baik atas bimbingannya.

Pada masyarakat tradisional sebagai hasil tambahan ekonomi keluarga adalah berburu. Kegiatan ini biasanya dilakukan di hutan dan memakan waktu berhari-hari. Dalam kegiatan ini "Kewang" biasanya juga berperan sebagai pimpinan rombongan. Pengetahuan tentang lokasi atau tempat-tempat di mana binatang buruan terdapat sangat penting artinya dalam keberhasilan perburuan. Kapan binatang tersebut mencari makan, di mana biasanya binatang tersebut minum, dan di mana dan kapan binatang itu beristirahat merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang ketua rombongan.

Dalam kenelayanan tugas Kewang juga sangat dominan dalam pengadaan sarana transportasi untuk berlayar dan mencari ikan. Seorang Kewang biasanya juga bertugas memimpin suatu rombongan yang hendak membuat perahu atau "kora-

kora'' untuk kegiatan kenelayanannya. Perahu biasa dibuat di hutan dekat pantai. Selama pembuatan perahu, Kewang dengan rombongannya tinggal di hutan. Mereka baru pulang ke desa setelah perahu selesai.

Melalui tugas dan tanggung jawab dari pejabat pemerintah dalam hal ini adalah Kewang, tampak bahwa dalam sistem pemerintahan tradisional pada masyarakat Ambon sangatlah memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini jelas terlihat dari keterlibatan langsung dari pejabat yang bersangkutan dalam berbagai penyerahan dan pembuatan sarana bagi kepentingan ekonomi masyarakat. Melalui pengetahuan dan contoh-contoh yang diberikan dengan cara langsung, transformasi pengetahuan dan keterampilan yang penting artinya bagi generasi berikutnya dapat berlangsung. Seorang Kewang dan pejabat lain yang berfungsi sebagai pimpinan dalam masyarakat tersebut biasanya berperan sebagai inovator dari sumber inspirasi bagi pengembangan kegiatan masyarakat termasuk juga berbagai hal kegiatan ekonomi.

C. NILAI KETUHANAN

Berkaitan dengan nilai kesejahteraan di atas, ketuhanan merupakan salah satu kebutuhan hidup spiritual manusia yang cukup penting artinya, tentang kebutuhan material telah dikupas dalam nilai kesejahteraan di atas. Sedangkan kebutuhan spiritual dalam sistem pemerintahan masyarakat Ambon akan dikupas dan dimasukkan dalam pembahasan tentang nilai ketuhanan.

Dengan konsep ketuhanan, manusia dihadapkan oleh suatu yang gaib dan besar, dan tidak terjangkau dalam sistem penalaran logis manusia itu sendiri. Hal ini biasanya berkaitan dengan masalah penciptaan bumi dengan segala isinya. Penyer-taan Tuhan dalam kehidupan manusia di dunia dan kehidupan manusia setelah mati. Dalam kerangka formal pemahaman-pemahaman tersebut terangkum dalam suatu lembaga yang disebut agama. Seperti telah disebutkan di bab terdahulu bahwa

masyarakat Ambon sebagian memeluk agama Islam dan sebagian lagi memeluk agama Kristen. Kedua agama besar tersebut telah masuk pada masyarakat di daerah ini sejak lama, yaitu pada sekitar abad XIV. Karena itu tidaklah mengherankan bila nilai-nilai ketuhanan terutama yang berdasarkan ajaran Islam dan Kristen telah merusak pada hampir segala aspek kehidupan, termasuk ke dalam sistem pemerintahannya.

Secara struktural memang tidak ada pejabat yang langsung bertugas menangani masalah ketuhanan atau keagamaan, tetapi setiap gerak kegiatan pemerintahan terutama yang bersifat formal didasari oleh nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai itu tampak misalnya dari berbagai upacara dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan atau melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan.

Pengangkatan seorang Raja atau pejabat pemerintahan yang lainnya misalnya selalu disertai dengan pembacaan doa. Doa ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang intinya adalah agar pejabat yang bersangkutan diberi kemampuan dalam memerintah, dari segala keputusan-keputusan yang diambilnya dalam rangka tugas pemerintahannya dapat dilakukannya secara adil dan bijaksana. Pengucapan doa yang merupakan rangkaian dari suatu upacara peribadatan biasanya dipimpin oleh seorang pendeta bila acara itu berlangsung di desa-desa yang penduduknya mayoritas Kristen. Dan dipimpin oleh para alim ulama bila dilakukan di desa-desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kegiatan peribadatan bukan saja berlangsung pada acara-acara yang bersifat pemerintahan atau yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintah, tetapi juga berlangsung hampir pada kegiatan-kegiatan formal masyarakat, seperti pada saat peluncuran kora-kora atau perahu, seorang pendeta hampir selalu dilibatkan. Doa sebagai acara pokok dalam kegiatan tersebut bermaksud untuk memohon perlindungan dan keselamatan bagi perahu beserta orang-orang yang akan menga-

walinya. Di samping juga agar perahu dengan segala peralatan yang ada dapat memberikan keberuntungan berupa hasil tangkapan ikan yang melimpah.

Melalui doa-doa yang dipanjatkan baik dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan maupun kemasyarakatan tampak bahwa masyarakat percaya dengan adanya kekuatan-kekuatan yang melebihi manusia, dan menentukan hidup serta kehidupan manusia. Dengan cara memohon kepada Tuhan manusia atau masyarakat yang melakukan suatu kegiatan tertentu dapat lebih tenang dan lebih mempunyai pengharapan baik berupa keselamatan ataupun keberuntungan. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup manusia, dan Tuhan akan memberikan apa yang dimohon oleh manusia, karena manusia adalah makhluk ciptaanNya sehingga Tuhan akan senantiasa menjaga perbuatan tangannya tersebut.

D. NILAI DEMOKRASI

Secara harfiah demokrasi dapat diartikan sebagai beradanya kekuasaan di tangan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berhak menentukan apa yang menjadi aspirasinya dalam menentukan jalan kehidupannya. Dalam pelaksanaannya wujud demokrasi diterjemahkan secara berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dan satu negara dengan negara lainnya. Model penentuan kedaulatan di tangan rakyat atau demokrasi sampai saat ini masih difahami sebagai budaya barat. Dahulu suku-suku bangsa di Indonesia terutama yang menganut sistem kerajaan dalam ketatanegaraannya. Raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

Dalam sistem pemerintahan tradisional masyarakat Ambon telah dikenal nilai-nilai demokrasi. Hal ini antara lain terlihat dari tata cara pemilihan pimpinan tertinggi mereka, dan dalam menentukan berbagai hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang akan memedomani peri kehidupan bermasya-

rakat. Desa sebagai satuan administratif terkecil di Ambon dalam tatanan sistem pemerintahan secara nasional, terutama yang berlokasi di luar daerah kota sampai saat ini masih menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kepercayaannya.

Sebutan Raja sebagai pemimpin tentunya dalam sistem pemerintahan tradisional masyarakat Ambon, tidak ada sangkut pautnya dengan istilah Raja yang secara umum dikenal, yaitu seseorang yang mengepalai pemerintahan dalam sistem kerajaan. Raja atau biasa disebut dengan Bapak pada masyarakat tradisional adalah seorang pemimpin formal yang diangkat oleh masyarakat berdasarkan pemilihan dengan menggunakan pemungutan suara. Walaupun juga faktor keturunan masih juga sering diperhatikan. Pemilihan Raja dilakukan dengan membentuk sebuah panitia. Jauh sebelum waktu pemilihan para panitia mulai mengumpulkan nama orang-orang yang dianggap layak untuk dijadikan Raja.

Nilai demokrasi dalam sistem pemerintahan masyarakat Ambon juga terlihat pada suatu lembaga yang disebut Badan Saniri. Lembaga ini dapat diumpamakan sebagai badan Permusyawaratan Rakyat. Badan ini beranggotakan Raja, Kepala-kepala Soa, Meuweng, tuan tanah, dan Kapitan. Lembaga Saniri mempunyai tugas memusyawarahkan segala keputusan yang akan diambil dan diberlakukan pada masyarakat. Pada lembaga inilah segala persoalan yang menyangkut masyarakat luas dibicarakan. Hal ini dilakukan agar apa-apa yang telah diputuskan untuk diberlakukan pada masyarakat tidak menemui hambatan dalam pelaksanaannya. Adu argumentasi untuk menerima suatu kesepakatan biasanya mewarnai sidang dari lembaga ini. Badan Saniri biasanya bersidang hanya sekali dalam setahun.

E. NILAI PENGAWASAN

Sistem pemerintahan tradisional masyarakat Ambon telah memasuki nilai-nilai pengawasan dalam menjalankan tugasnya melindungi dan mengayomi masyarakatnya. Dalam kehidupan

bermasyarakat nilai pengawasan terlihat dari adanya hukuman-hukuman yang dikenakan pada mereka yang melanggar aturan-aturan adat yang berlaku. Melalui hukuman-hukuman yang diberikannya itu diharapkan masyarakat akan mentaati segala aturan yang telah diterapkan. Hukuman yang diberikan bagi pelanggar biasa disebut dengan "Sasi".

Salah satu bentuk pelanggaran adat pada masyarakat Ambon adalah kawin antara sesama "pela keras". Seperti telah disebutkan pada bab terdahulu bahwa pada masyarakat Ambon dikenal istilah "pela, yaitu ikatan persahabatan antar warga dari dua desa atau lebih yang dibentuk atas dasar ikatan adat. Ada dua jenis pela yaitu pela keras dan pela tempat sirih atau lunak. Antar sesama pela keras berdasarkan hukum adat dilarang saling kawin. Bila hal ini dilanggar maka warga masyarakat tersebut akan dihukum dihadapan Raja. Adapun bentuk hukumannya antara lain adalah dihina, diejek, dan dipukul di depan umum. Dikalangan masyarakat dipercaya bahwa pelanggaran tersebut tidak selesai hanya sebatas hukuman secara fisik saja, tetapi juga berlanjut pada kehidupan rumah tangga di masa mendatang, seperti keluarga tersebut hidupnya tidak bahagia.

Pengawasan juga dilakukan bagi lingkungan hidup yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti pada hasil hutan, hasil laut, kampung dan kebun. Sejumlah pohon yang menghasilkan keperluan bagi masyarakat seperti sagu dan kelapa biasanya mendapatkan pengawasan agar pemanfaatannya tidak berlebih-lebihan, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Pohon-pohon yang mendapat pengawasan diberi tanda-tanda tertentu seperti simpul-simpul daun. Bagi mereka yang mengambil atau memanfaatkan pohon yang diawasi tersebut akan menerima hukuman. Bila pengawasan itu dilakukan oleh gereja, maka si pelanggar dikenakan "sasi" gereja, sedangkan bila pengawasan itu dilakukan oleh desa atau negeri, si pelanggar dikenakan "sasi" negeri. Pelanggaran pada "sasi" gereja dipercaya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Karena itu hukuman bagi si pelanggar biasanya berbentuk permohonan ampun pada Tuhan melalui pendeta gereja yang bersangkutan.

BAB V KESIMPULAN

1. Masyarakat Ambon memiliki latar belakang sejarah yang syarat dengan pengaruh kebudayaan asing. Kebudayaan asing tersebut masuk ke Ambon melalui jalur perdagangan rempah-rempah yang pada sekitar abad XIV merupakan komoditi ekonomi dan strategis terutama di daratan Eropa. Paling tidak kebudayaan asing yang mempengaruhi kebudayaan Ambon saat ini termasuk juga dalam sistem pemerintahannya adalah kebudayaan Islam, Portugis, dan Belanda. Masuknya warna-warna kebudayaan tersebut umumnya melalui penguasaan. Setiap kekuatan yang menguasai Ambon memberikan corak pemerintahan sendiri-sendiri sesuai dengan tujuan dan misi penguasaannya di daerah ini.
2. Seperti juga sistem pemerintahan di daerah lain, sistem pemerintahan tradisional masyarakat Ambon juga telah mengenal khirarki penguasaan dan pemerintahan. Dari pembagian tugas antar unsur-unsur pejabat pemerintahan sesuai dengan fungsi serta bidang tanggung jawabnya. Khirarki penguasaan dan pemerintahan didasari oleh keterbatasan seseorang pejabat dalam melayani dan mengawasi bidang-bidang kehidupan yang sangat kompleks dan luas. Sesuai dengan masyarakatnya yang bercorak agraris.

Pembagian tugas juga didasarkan pada masalah tersebut. Pertaruhan, kenelayanan, adat, dan peribadatan merupakan fokus utamanya.

3. Dalam memenuhi hajat hidup masyarakatnya sistem pemerintahan tradisional masyarakat Ambon didasari paling tidak oleh 5 buah nilai yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan terangkum menjadi satu kesatuan. Nilai-nilai tersebut adalah, nilai perlindungan, nilai kesejahteraan, nilai demokrasi, nilai ketuhanan, dan nilai pengawasan. Kelima nilai tersebut tercermin pada struktur pemerintahan yang ada dan mekanisme pelaksanaan ke pemerintahannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Soebejakto (editor)

1975 *"Masyarakat Ambon" dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jambatan

1977 *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. P.T. Dian Rakyat.

Leirissa, Richardz

1975 *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Proyek Pengembangan Media Kebudayaan

1971 *Monografi Daerah Maluku*. Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah

1978 *Adat Istiadat Daerah Maluku*. Proyek Penelitian Buku Bacaan dan Sastra Indonesia Daerah. Depdikbud. Jakarta

R. Moh Ali

1963 *Peranan Bangsa Indonesia Dalam Sejarah Asia Tenggara, Bharata*. Jakarta

Statistik Kotamadya Ambon

1990 *Kotamadya Ambon Dalam Angka*. Pemda Kotamadya Ambon

Tutupoha, Rosmin, S.H. dkk.

1991 *Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Maluku.*
Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai
Budaya. Ditjarahnitra. Ditjenbud. Depdikbud.

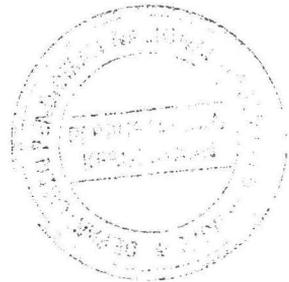
Uneputty, T.JA., Drs., dkk.

1980/1981 *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah
Maluku.* Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah. Pusat Penelitian Sejarah
dan Budaya Depdikbud.

Uneputty, T.JA., Drs. dkk.

1985 *Upacara Tradisional yang Berkaitan dengan
Peristiwa Alam dan Kepercayaan Daerah Ma-
luku.* Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah. Depdikbud Jakarta.

* * * * *



003840.1



B4.1

3

S

Pe

Kebuda